

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*
DI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana ilmu sosial
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

Riva Nurul Inayah
NIM. 062409

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2010**

Abstrak

Riva Nurul Inayah. Implementasi *E-government* Di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata Kunci : *E-government*, Implementasi

Fokus penelitian ini adalah implementasi *e-government* (*electronic government*) di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, Dimana Dinas pertambangan dan energi merupakan sebuah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah menerapkan *e-government* (*electronic government*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana *e-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 86 orang pegawai, sedangkan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Teori yang digunakan adalah teori yang diungkapkan oleh **Indrajit** yang terdiri dari tujuh indikator yaitu : pengembangan isi, pembangunan kompetensi, konektivitas/hubungan, peraturan dan undang-undang *cyber*, interaksi pengguna, modal. Dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan. Untuk menganalisis data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kurang maksimal. Hasil perhitungan menyatakan bahwa angka t hitung \leq t tabel $(-13,38 < 2,358)$ dan didukung dari hasil yang mencapai hanya 61,4% dari nilai yang diharapkan. Kurang maksimalnya implementasi *e-government* tersebut disebabkan oleh kurangnya frekuensi pelatihan; kurangnya *updating* data dan informasi, kurangnya anggaran pengembangan *e-government*. Saran peneliti dalam implementasi *e-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten agar dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para pegawai; melakukan pengawasan dalam hal *update* data dan informasi serta penyusunan kembali prioritas anggaran agar mendukung penerapan *e-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sehingga dapat berjalan secara maksimal.

Abstract

Riva Nurul Inayah. E-government Implementation at Dinas Pertambangan dan Energi Of Banten Province. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa.

Keywords: E-government, implementation

*The research focuses on e-Government implementation at Dinas Pertambangan dan Energi of Banten Province, in which Dinas Pertambangan dan Energi is a SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) that has implementation of e-government. The objective of the research is to find out how is the implementation of e-Government in Dinas pertambangan dan Energi of Banten Province. The method that is used in the research is descriptive quantitative. The population of the research is 86 employee. Whereas, the technique sampling that is used is saturated Samples. The basic theory of the research is based on **Indrajit** that consist of six indicators, there are the Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interfaces, Capital. In collecting the data, the researcher took the question are, observation, and study the literature. To analyzed the data, the researcher used one sampel t-test as the test of hypothesis. Based on the result of the research, it shown that the implementation of e-Government at Dinas Pertambangan dan Energi of Banten Province was less maximal. The result of calculation indicated that $t\text{-statistic} < t\text{-table} = (-13,38 < 2,358)$ and it is supported by the result that is 61,4% only from the expecatation. Less maximum of frequency of training; The lack of cordination for updating information; And the lack of budget for development of e-Government . The researcher's suggestions in the implementation of e-Government at Dinas Pertambangan dan Energi of Banten Province for the next are the researcher expect that it will be conduct the training for employee; enhance the controlling for update information; and re-arrange the budget to support development implementation of e-Government at Dinas Pertambangan dan Energi of Banten Province, so they can work maximally.*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN	14
2.1 Deskripsi Teori	14
2.1.1 Pengertian Implementasi	14
2.1.2 Definisi <i>E-government</i>	18
2.1.3 Manfaat <i>E-government</i>	31

2.1.4	Tujuan <i>E-government</i>	36
2.2	Kerangka Berpikir	39
2.3	Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		44
3.1	Metode Penelitian	44
3.2	Instrumen Penelitian	44
3.3	Populasi dan Teknik Sampling	46
3.4	Sumber Data Yang Diperlukan	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data	47
3.6	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument	48
3.7	Metode Analisis Data	49
3.8	Lokasi dan Jadwal Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN		52
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	52
4.2	Deskriptif Data	58
4.2.1	Identitas Responden	58
4.2.2	Indikator <i>Content Development</i>	61
4.2.3	Indikator <i>Competensy Building</i>	70
4.2.4	Indikator <i>Connectivity</i>	75
4.2.5	Indikator <i>Cyber Laws</i>	79
4.2.6	Indikator <i>Citizen Interface</i>	86
4.2.7	Indikator <i>Capital</i>	93

4.3 Hasil Uji Validitas Instrument.....	97
4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrument.....	98
4.5 Pengujian Hipotesis.....	100
4.6 Intrepretasi Data.....	103
4.7 Pembahasan.....	103
BAB V PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1	Operasional Variabel 46
Tabel 3.2	Skor Penelitian 47
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian Peneliti 52
Tabel 4.1	Infrastruktur Komputer 58
Tabel 4.2	Tanggapan Responden Tentang <i>Software</i> Pendukung 61
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Tentang Aplikasi <i>Software</i> 62
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Tentang Pengaplikasian <i>Software</i> 64
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Tentang Sistem Kearsipan Manual 66
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Tentang <i>Firewall</i> 68
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Pegawai 70
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Tentang Keahlian Khusus 72
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Tentang Pelatihan Pegawai 74
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Komputer 76
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Tentang Perangkat Komputer 78
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Tentang Situs Informasi 80
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Tentang Inpres No.3 Tahun 2003 81
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Tentang Kerangka Hukum 83
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Tentang Pergub No.35 Tahun 2008 84
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Masyarakat 86

Tabel 4.17	Tanggapan Responden Tentang Pengiriman Data	88
Tabel 4.18	Tanggapan Responden Tentang Fasilitas <i>Chatting</i>	89
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Pengadaan Barang	91
Tabel 4.20	Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Pelayanan	92
Tabel 4.21	Tanggapan Responden Tentang Anggaran Pemeliharaan	94
Tabel 4.22	Tanggapan Responden Tentang Anggaran Pengembangan.....	95
Tabel 4.23	Validitas Instrument	98

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Website Dinas Pertambangan dan Energi	5
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	54
Gambar 4.2 Roadmap <i>E-Government</i> Provinsi Banten	6
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	102

DAFTAR DIAGRAM

	<i>Halaman</i>
Diagram 4.1 Kategori Responden	59
Diagram 4.2 Tanggapan Responden Tentang <i>Software</i> Pendukung	62
Diagram 4.3 Tanggapan Responden Tentang Aplikasi <i>Software</i>	63
Diagram 4.4 Tanggapan Responden Tentang Pengaplikasian <i>Software</i>	65
Diagram 4.5 Tanggapan Responden Tentang Sistem Kearsipan Manual	67
Diagram 4.6 Tanggapan Responden Tentang <i>Firewall</i>	69
Diagram 4.7 Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Pegawai	71
Diagram 4.8 Tanggapan Responden Tentang Keahlian Khusus.....	73
Diagram 4.9 Tanggapan Responden Tentang Pelatihan Pegawai.....	75
Diagram 4.10 Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Komputer	77
Diagram 4.11 Tanggapan Responden Tentang Perangkat Komputer	78
Diagram 4.12 Tanggapan Responden Tentang Situs Informasi	80
Diagram 4.13 Tanggapan Responden Tentang Inpres No.3 Tahun 2003	82
Diagram 4.14 Tanggapan Responden Tentang Kerangka Hukum	83
Diagram 4.15 Tanggapan Responden Tentang Pergub No.35 Tahun 2008	85
Diagram 4.16 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Masyarakat	87
Diagram 4.17 Tanggapan Responden Tentang Pengiriman Data	88
Diagram 4.18 Tanggapan Responden Tentang Fasilitas <i>Chatting</i>	90
Diagram 4.19 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Pengadaan Barang	91
Diagram 4.20 Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Pelayanan.....	93

Diagram 4.21 Tanggapan Responden Tentang Anggaran Pemeliharaan.....	94
Diagram 4.22 Tanggapan Responden Tentang Anggaran Pengembangan	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar riwayat hidup
- Kuesioner
- Data hasil kuesioner
- Perhitungan Uji Validitas Instrument
- Perhitungan Uji Reliabilitas Instrument
- Nilai-Nilai Distribusi t
- Tabel Product Moment
- Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* Republik Indonesia
- Surat permohonan ijin penelitian dari Fakultas FISIP
- Surat pernyataan selesai penelitian dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
- Catatan bimbingan peneliti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Hasil penelitian yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan dengan senang hati, sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Ibu Rahmi Winangsih, Dra. M.Si., Pembantu Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Idi Dimyati, S.Ikom., Pembantu Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Rina Yulianti, S.Ip M.Si., dosen pembimbing 1 yang dengan sabar memberikan nasehat, arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ipah Ema Jumiati S.Ip, M.Si., dosen pembimbing 2 yang juga dengan sabar dan memberikan masukan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali peneliti dengan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Ir. H. Cepi Suwardi Mulya Noor, MM. M.Si., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mencari data sesuai dengan yang peneliti butuhkan.
10. Seluruh Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, terima kasih atas waktu dan tenaganya untuk menjadi responden dalam penelitian ini, terima kasih pula untuk telah mengizinkan peneliti meminta waktu dan tenaga-nya dalam membantu peneliti mencapai tujuan penelitian ini.
11. Papah, Mamah dan Adik-adikku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang selama hidupku ini.

12. Jantan, iyan, Maya, Ajenk, Noni dan Puspita terima kasih atas doa dan motivasi selama ini.
13. Teman-teman Administrasi Negara kelas F dan G angkatan 2006 : Azwar Soleh Wijaya S.Sos dan Budi Hasanah S.Sos teman seperjuangan selama ini; Upus atas ilmu validitasnya; dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 11, Desa Kilasah Kota Serang.
15. Seluruh Keluarga besar PT. Bintara Sinergis *Multifinance* (BESS *FINANCE*) cabang Serang atas dukungannya selama ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya bagi perkembangan keilmuan khususnya tentang *e-Government*.

Serang, Oktober 2010

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi saat ini begitu pesat dan telah semakin meluas. Penggunaan teknologi yang tidak hanya terbatas pada bidang bisnis dan perdagangan tetapi sudah lebih meluas pada bidang-bidang lainnya, seperti bidang pendidikan, sosial, pertahanan keamanan, pemerintahan dan sebagainya. Pola komunikasi antar individu juga berubah sejalan dengan perkembangan jaringan global yang tidak ada batasan-batasan budaya, suku bangsa, wilayah, dan negara. Teknologi informasi dan komunikasi (*ICT/Information And Communication Tekhnologi*) digunakan karena memiliki kelebihan – kelebihan seperti dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang murah, sehingga lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara manual atau tradisional dalam mengakses informasi.

Seluruh pemerintahan di dunia saat ini mengalami tantangan globalisasi yang dipacu oleh perkembangan teknologi informasi dan semangat liberalisme telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial budaya. Perubahan tersebut mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas (*borderless world*). Peristiwa penting yang terjadi pada suatu negara secara cepat dapat diakses oleh masyarakat di negara pada belahan dunia lain. Perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pelayanan sektor publik dan sektor bisnis sedemikian rupa sehingga berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa tatap muka, arus informasi telah mampu menembus batas ruang dan waktu secara cepat.

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara fundamental mengalami perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang demokratis, transparansi dan bercirikan *Good Governance*. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Penataan yang tengah pemerintah laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*.

Electronic government di Indonesia inisiatifnya sudah dimulai sejak tahun 2003 seiring dengan keluarnya INPRES No. 3/2003, tetapi kondisi penerapannya di lapangan sangat bervariasi. Ada instansi pemerintah yang sudah cukup maju, tetapi banyak juga yang masih dalam taraf mendengar dan mengenalnya. *E-Government* selalu melibatkan teknologi informasi (TI), tetapi pembangunan fasilitas TI belum tentu mengarah pada keberhasilan implementasi *e-Government*.

Agar kebijakan pengembangan *e-Government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan – peraturan, standarisasi dan panduan (pedoman) yang konsisten dan saling

mendukung. Dalam hal ini pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat/daerah serta masyarakat luas, agar terjalin suatu sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat.

E-Government merupakan sebuah awal perubahan paradigma pemerintahan yang semula berupa pemerintahan yang sentralistik menuju kepada *Customer Centric*. Perubahan paradigma ini berdampak baik bagi pelayanan publik yang identik dengan birokrasi yang kaku menjadi pelayanan yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *E-Government* juga menjadi trend dalam pembangunan di Indonesia, namun sangat disayangkan bahwa masih banyak pengelola *e-Government* yang kurang memahami *e-Government* dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan *e-Government*.

Pemerintah Indonesia pada kenyataannya tergolong paling terlambat menerapkan teknologi informasi, baik pada sisi teknologi, SDM maupun kelengkapan sistem informasi dan *database*. Sistem pembinaan karier dalam pemerintahan juga relatif kurang mendukung keberlanjutan dan profesionalisme pengelola *e-Government*, seperti tidak ditempatkannya pengelola arsip SKPD yang telah mengikuti diklat sebagai pengelola arsip pada unit kerjanya. Oleh karena itu harus ada koordinasi antara badan diklat, KPDE dan ARDA dalam penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan fungsional kearsipan guna memenuhi kompetensi minimal jabatan fungsional arsip.

Pembangunan *e-Government* di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten dilaksanakan secara sinergis dan kesisteman yang mulai dilakukan pada tahun 2004 antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika) dan seluruh SKPD Provinsi Banten sebagai sub sistemnya. Pemerintahan Provinsi Banten tengah mempersiapkan segala aspek pendukung guna mewujudkan pelayanan publik Provinsi Banten berbasis *digital* atau secara *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan adanya sistem *e-Government* dalam Pemerintahan Provinsi Banten membawa manfaat yang sangat besar diantaranya tersosialisasinya berbagai informasi mengenai berbagai potensi daerah dan informasi lain seputar kegiatan pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya serta meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kinerja SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Ada 35 Instansi di pemerintahan Provinsi Banten salah satu instansi yang telah menerapkan *e-Government* adalah Dinas Pertambangan dan Energi. Dinas Pertambangan dan Energi di dalamnya memiliki 4 bidang yaitu Bidang Bina Usaha dan Kerja Sama, Bidang Energi dan Ketenaga Listrik, Bidang Pertambangan dan Geologi, dan Bidang Program

Evaluasi dan Pelaporan, bidang – bidang ini dibagi atas seksi-seksi (LAKIP-DISTAMBEN 2009). Seksi Data dan Informasi adalah bagian yang menangani atau berhubungan langsung dengan pengembangan *e-Government* pada Dinas Pertambangan dan Energi.

Website Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten dengan domain *distamben.banten.go.id* merupakan suatu bentuk bahwa dinas ini sudah menerapkan *e-Government*. *Website* tersebut merupakan sumber informasi bagi masyarakat dan swasta dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Namun dalam pengadaan data dan informasi pada *website* masih sangat kurang, setelah mengamati selama hampir 1 bulan yang dimulai dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 5 Maret 2009 terhadap pengadaan atau penginputan data, ternyata banyak *link* yang tidak ada berita atau informasi di dalamnya.

Gambar 1.1



Sumber : *website* DISTAMBEN Provinsi Banten

Dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Kekurangan SDM menjadi salah satu penghambat khususnya pada Seksi Data dan Informasi, yang hanya memiliki 3 orang pegawai yang terdiri dari Kasi dan 2 orang stafnya. Sedangkan yang memiliki latar belakang teknik komputer hanya 1 orang (tenaga ahli). Hal tersebut akan menyulitkan bagi Seksi Data dan Informasi dalam melakukan tugasnya, terutama dalam hal meng*up-date* data dan informasi yang akan disajikan dalam *website* Dinas Pertambangan Dan Energi.

Selain itu dari hasil observasi pada Seksi Data dan Informasi bahwa koordinasi antar bidang dalam meng*input* data kepada Seksi Data dan Informasi kurang baik, Sehingga menghambat pelaksanaan tugas dari Seksi Data dan Informasi dalam meng*update* data dari bidang – bidang di Dinas Pertambangan dan Energi. Oleh karena itu penerapan *e-Government* harus sejalan dengan peningkatan SDM, kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap pegawai menyebabkan kurangnya pengetahuan di dalam pengoprasian sarana-sarana dari *e-Government* tersebut. Sedangkan, Kunci dari keberhasilan *e-Government* adalah faktor Sumber Daya Manusia, mengingat bahwa manusialah nanti yang menjadi penggerak dari perangkat-perangkat serta sistem informasi yang menunjang keberhasilan *e-Government*. Oleh karena itu maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi guna menunjang keberhasilan *e-Government*.

Guna mendukung terselenggaranya *e-Government* maka perlu ada kegiatan dalam meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bentuk penyelenggaraan yang dimulai dari sosialisasi, bimbingan teknis dan *inhouse training* bidang Kominfo serta pengangkatan jabatan fungsional pranata komputer. Kemudahan dalam mengakses informasi baik dalam lingkungan pegawai maupun masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

Permasalah budaya (*culture*) menjadi kendala dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi bahwa masih ada pegawai yang menggunakan sistem analog dari pada beralih kepada *electronic government*. Sehingga banyak yang harus dibenahi dalam pengembangan *e-Government* khususnya mengenai perubahan *culture*, agar dapat beralih dari yang menggunakan sistem analog (tradisional) menjadi *electronic government* dalam pekerjaannya. Contohnya seperti setiap SKPD sudah disediakan komputer sebagai alat penunjang dalam bekerja agar lebih efisien, akan tetapi ada saja pegawai yang masih menggunakan mesin tik dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Kemudian Berdasarkan hasil observasi di lapangan Pengadaan infrastruktur (sarana dan prasarana) dari *e-Government* belum memadai. Pengadaan komputer yang ideal adalah setiap SKPD memiliki satu komputer guna menunjang pekerjaannya tetapi belum terlaksana. Infrastruktur komputer yang ada tidak semua dalam kondisi baik,

berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti terdapat 10 komputer dalam keadaan rusak dari total 52 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang berjumlah 86 orang, tentunya tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur komputernya. Sehingga dapat menghambat proses penerapan *e-Government* dan juga akan menghambat proses kerja para pegawainya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja sangatlah penting. Oleh karena itu penyediaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perlu dilakukan secara rutin namun berdasarkan hasil observasi, penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi terkendala dalam hal perawatan dari infrastruktur (sarana dan prasarana) *e-Government*. Jika terjadi kerusakan infrastruktur penunjang yang terjadi sebut saja akibat tersambar petir, seharusnya dapat segera diperbaiki, namun pada kenyataannya butuh waktu lama dalam melakukan perbaikan tersebut. Selain itu penyimpanan sarana dan prasarana penunjang *e-Government* juga belum maksimal dikarenakan 2 gedung yang dijadikan tempat pelaksanaan tugas dan aktivitas yaitu gedung SDM dan gedung PU dan Wasdal masih berstatus sewa (LAKIP DISTAMBEN, 2009). Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana yang ada tidak tertata dengan baik sehingga penggunaannya kurang efektif dalam menunjang pekerjaan.

Penerapan *e-Government* akan membantu pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Namun masalah yang sangat penting dalam

penerapan *e-Government* adalah masih ada saja pegawai yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari penerapan *e-Government*. Bagaimana seorang pegawai dapat merealisasikan dan menjalankan *e-Government* sedangkan mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan dari penerapan *e-Government*.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti mencoba menganalisis implementasi *e-Government* di DISTAMBEN Provinsi Banten dengan judul : **"IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian dari hasil studi penelitian diantaranya :

1. Pengadaan data dan informasi kurang pada *website*.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam teknologi informasi.
3. Budaya (*Culture*) dari aparatur pemerintah yang masih bersifat traditional (menggunakan sistem analog).
4. Kurangnya fasilitas komputer sehingga menghambat proses kerja para pegawainya.

5. Kurangnya perawatan dari infrastruktur (sarana dan prasarana) *e-Government*.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti membatasi masalah dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan dan manfaat, Maka penelitian ini terfokus pada objek penelitian, yaitu menganalisis implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan energi (DISTAMBEN) Provinsi Banten, dengan subjek para pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Berdasarkan batasan masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah :

Berapa besar implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka maksud dan tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk :

Untuk mengetahui berapa besar implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis, yaitu :

- a) Dalam rangka pengembangan teori yang telah diperoleh selama dalam perkuliahan.
 - b) Dapat dijadikan bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.
 - c) Untuk meningkatkan kualitas belajar dan memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi peneliti.
2. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam implementasi penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I yaitu pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif. Identifikasi Masalah yaitu masalah yang muncul dimana berkaitan dengan tema/topik penelitian. Pembatasan dan Perumusan Masalah yaitu menetapkan masalah yang paling urgen yang sesuai dengan judul penelitian serta mendefinisikan masalah yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam Bab II merupakan Deskripsi Teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian sehingga dapat digunakan untuk

merumuskan hipotesis. Kerangka Berfikir yang menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori. Hipotesis penelitian yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan akan diuji kebenarannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab III memaparkan Metode Penelitian. Instrumen Penelitian yang menjelaskan proses penyusunan dan jenis alat yang digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan kualitas instrumen. Populasi dan Sampel Penelitian. Teknik Pengolahan dan Analisa Data, Tempat dan Waktu dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam Bab IV memaparkan Deskripsi Objek Penelitian. Deskripsi Data yakni data mentah yang telah diolah menggunakan teknik analisis data yang relevan. Pengujian Persyaratan Statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu / Pengujian Hipotesis. Interpretasi Hasil Penelitian yakni penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Dan Pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V yaitu Penutup, dipaparkan Simpulan dan Saran yang diungkapkan peneliti terkait dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian.

Dengan penggunaan teori akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dan alat yang tepat untuk mempermudah pekerjaan.

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologis **implementasi** sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *to Implement* yang artinya Pelaksanaan; Penerapan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:427).

Sedangkan menurut **Susilo** (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

Menurut **Kamus Webster** dalam **Wahab** (2005:64) mengartikan implementasi sebagai "*to provide the means for carrying out; to give practical effect to*". Berarti implementasi

adalah menyediakan sarana untuk melakukan kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan menurut **Pressman** dan **wildavsky** dalam **Wahab** (2005:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan.

Sementara itu **Lester** dan **Stewart** dalam Agustino, (2007:176) menyatakan bahwa:

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*) keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.”

McLeod (2004:144) mengungkapkan bahwa definisi implementasi adalah kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Maksud dari definisi di atas yaitu bahwa suatu kegiatan yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang handal dan infrastruktur yang memadai akan menghasilkan suatu sistem yang berjalan dengan baik. Lebih lanjut menurut **McLeod**, ada beberapa langkah-langkah dalam penerapan implementasi agar berjalan dengan baik, sebagai berikut :

1. Merencanakan penerapan, sebelum sistem baru dijalankan manajer dan spesialis informasi harus memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menjalankan sistem baru;
2. Mengumumkan penerapan, penerapan diumumkan kepada pegawai dengan cara yang sama seperti pada

penelitian sistem. Tujuan pengumuman ini adalah menginformasikan pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru;

3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras;
4. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak, memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, *programmer* menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem sebagai titik awal;
5. Menyiapkan *Database*, mengelola *database* bertanggungjawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini mencakup persiapan *database*;
6. Menyiapkan fasilitas fisik, perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan;
7. Mendidik peserta dan pemakai, pegawai harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan ini harus dijadwalkan jauh setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari mulai diterapkan;
8. Menyiapkan usulan *cutover*, proses menghentikan penggunaan sistem lama memulai penggunaan sistem baru. Ketika sudah jelas bahwa seluruh pekerjaan pengembangan hampir menuju akhir, tim proyek merekomendasikan pada manajer agar dilaksanakan *cutover*. Usulan ini dapat berbentuk memo atau laporan lisan;
9. Menyetujui atau menolak masukan ke sistem baru;
10. Masuk ke sistem baru.

Sedangkan menurut **Grindle** dalam Agustino (2006:154), mengutarakan tentang keberhasilan dari implementasi diantaranya sebagai berikut :

"Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat *action programmer* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai."

Selain itu menurut **Nugroho** (2007) terdapat aspek – aspek

implementasi yaitu :

1. Teknis dan infrastruktur :
 - a. Penyedia perangkat keras (komputer terminal, server, dsb)
 - b. Pemasangan jaringan komputer (LAN maupun Internet)
 - c. Pengembangan aplikasi (*software*) sistem – sistem informasi.
2. Perubahan prosedur – prosedur birokrasi
 - a. Perubahan tatalaksana diperlukan untuk memaksimalkan dukungan TIK (tehnologi informasi dan komunikasi)
 - b. Diwujudkan dalam bentuk *standar operating procedures* (SOP) atau termuat dalam tupoksi SKPD (satuan kerja perangkat daerah)
 - Bagi SKPD : pedoman dalam menjalankan layanan
 - Bagi masyarakat : pedoman dalam menggunakan layanan
3. Pemberdayaan SDM
 - a. Operator : pemahaman tentang cara mengoperasikan aplikasi dan menjalankan prosedur – prosedur terkait
 - b. Pejabat terkait : pemahaman tentang sistem baru dalam perspektif pelayanan publik/koordinasi antar instansi
 - c. Dukungan SDM teknis : untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin
4. Operasional dan Pemeliharaan Sistem
 - a. Penjaminan tingkat pelayanan (*quality of service*), konsep “pelayanan prima”
 - standar layanan
 - monitoring dan evaluasi
 - peningkatan secara berkelanjutan
 - b. Pengamanan sistem komputer
 - virus dan gangguan – gangguan dari luar
 - pengaksesan data oleh pihak – pihak yang tidak berhak
 - pengamanan juga perlu dari sistem internal

Menurut **Rokhman** (2008), mendefenisikan implementasi *e-Government* adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, *transparansi*, dan *akuntabilitas*

penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.

2.1.2 Definisi E-Government

World Bank memberikan definisi dari istilah *e-Government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga Negara, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Sedangkan konsep yang disusun oleh EZ Gov, selaku konsultan dalam penerapan *e-Government*, memiliki pengertian penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. (Rifaiza, 2007)

Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan pengurangan biaya.

Inisiatif penerapan *e-Government* di Indonesia yang diperkenalkan melalui Intruksi Presiden No. 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (*Telekomunikasi, Media Dan*

Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan percepatan proses demokrasi. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dalam INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. *E -Government* tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengertian umum *electronic government (e-Government)* adalah “Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*”.

Menurut Wicaksana (dalam iwayan@staff.gunadarma.ac.id), *e-Government* didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk

meningkatkan efisiensi dan *cost effective* pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat. Lebih lanjut **Wibisono dan Sulistianingsih** dalam artikelnya yang berjudul *The Development of E-government in Indonesia* mengatakan bahwa :

“E-government is the use of ICT by government in its administration processes and its service delivery. E-government refers to the use ICT, such as wide area network, the internet, and mobile computing, by government agencies to improve their service.”

E-Government dipakai oleh teknologi informasi dan komunikasi melalui pemerintahan di dalam proses administrasi dan pengantar jasa. *E-Government* juga dipakai oleh teknologi informasi dan komunikasi, seperti wilayah jaringan yang luas, internet, dan komputerasi *mobile*, melalui agensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan,

Menurut **OECD** (*Organization Economic of Community Development*) dalam Budiati (2003:11), menyatakan bahwa :

E-government is internet delivery and other internet-base activity such as e-consultation; e-government is equated to the use of ICT in government with a focus on the delivery of services and processing and all government activity; and finally, e-government is the capacity to transform public administration through the use ICTs.

Pernyataan di atas tersebut mengatakan bahwa *e-Government* adalah penghantar jasa internet dan kegiatan lainnya berdasarkan internet, seperti *e-consultation*, *e-Government* merupakan kesamaan kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dengan fokus penghantar jasa dan proses dan seluruh aktivitas pemerintah; dan terakhir, *e-Government* merupakan kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut **Holmes** (Juni, 2007) mengungkapkan bahwa definisi *e-Government* sebagai berikut :

“Kegunaan teknologi informasi untuk memberikan atau menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya”.

Wescott (Pejabat Senior *Asian Development Bank*) dalam **Rifaiza** (2007), mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut :

“E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat”.

Menurut **Sosiawan** (2007), mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut :

“Proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara

lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian *e-Government*, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu dan, yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga Pemerintahan dapat berjalan lebih efisien”.

Pengertian dari *e-Government* sebenarnya tidak hanya sebatas pada pengertian yang telah disebutkan di atas, karena masing-masing negara pun juga menerapkan konsep *e-Government* yang memiliki pengertian berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari negara tersebut. Adapun ada beberapa faktor yang menjadi menyebabkan definisi *e-Government* itu beragam (Sosiawan, 2007). Diantaranya beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Konsep *e-Government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi karena setiap negara implementasi atau penerapannya berbeda-beda, maka konsep *e-Government* pun menjadi beraneka ragam;
2. Wahana aplikasi *e-Government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
3. Pengertian dan penerapan *e-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Pemerintah **New Zealand** dalam **Rafaiza** (2007) mendefinisikan *e-Government*, yaitu :

“E-government is a way for government to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greather apportunities to participate in our democratic institutions and processes”. (*E-government* adalah sebuah cara bagi

pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi).

Menurut Pemerintah **Nevada** dalam **Indrajit** (2006:3)

menyatakan *e-Government* sebagai berikut :

1. *Online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with convenient access;*
 2. *Government operations for internal constituencies that simplify the operational demands e-government for both agencies and employees.*
- (1. Pelayanan *online* menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan pemerintahan;
2. Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat disederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya).

Negara **Italy** (Indrajit, 2006:4) merupakan termasuk Negara yang paling lengkap dan detail dalam mendefinisikan *e-Government*, diantaranya : Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology-ICT*) yang modern pada pengadministrasian, dapat kita dibandingkan menurut kelas aksi dibawah ini:

1. *Computerization designed to enhance operational efficiency within, individual departments and agencies;*
 2. *Computerization of services to citizens and firms, often implying integration among the services of different department and agencies;*
 3. *Provision of ICT access to final users of government services and information.*
- (1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi

- operasional dengan inividu tiap departemen dan divisi;
2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang berbeda;
 3. Ketetapan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pengguna akhir dari layanan informasi pemerintahan).

Menurut **Heeks** dalam Djunaedi (2002) , *e-Government* diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *e-Government* mencakup:

1. *e-Administration*: untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan menghemat biaya, dengan mengelola kinerja, dengan membangun koneksi strategis dalam pemerintah sendiri, dan dengan menciptakan pemberdayaan.
2. *e-Citizen & e-Services*: menghubungkan warga masyarakat dengan Pemerintah dengan cara berbicara dengan warga dan mendukung akuntabilitas, dengan mendengarkan masyarakat dan mendukung demokrasi, dan dengan meningkatkan layanan publik.
3. *e-Society*: membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara lebih baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat, dengan membangun kerjasama dengan pemerintah, dan dengan membangun masyarakat madani.

Hermawan Kartajaya dkk. (2002: 330) menjelaskan tiga tahapan pengembangan layanan *e-Government*, sebagai berikut:

- Tahap 1 : Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas *komunikasi dua arah*.
- Tahap 2 : Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (*online*), diolah, dan

disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara *offline*, publik dapat memantau kinerja secara *online*.

Tahap 3 : Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi blanko aplikasi secara *online* (lewat internet).

Belum seluruh bagian masyarakat kita mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, tapi dengan tantangan global (seperti: Pasar Bebas Asean 2003) dan kebutuhan untuk menarik investor dan wisatawan maka pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan *e-Government* di daerahnya masing-masing. Pengembangan tersebut perlu disesuaikan dengan visi, misi, strategi dan program pembangunan wilayahnya, atau dengan kata lain pengembangan *e-Government* perlu mempunyai tujuan dan agenda yang jelas.

Tanpa masuk ke teknologi *e-Government*, pemerintahan daerah kita akan terisolasi dan tertinggal dalam dunia dengan pembedaan *digital (digital divide)*. Selain itu, revolusi informasi yang didukung dengan pesatnya perkembangan ICT juga telah terjadi di luar bidang pemerintahan, yaitu antara lain dalam bentuk: *e-banking, e-commerce, distance education*, dan sebagainya.

Agar kita dapat berhasil dan unggul dalam penerapan *e-Government*, maka perlu kita simak nasehat dalam publikasi *the Harvard Policy Group* dalam Djunaedi (2002). Menurut nasehat tersebut, kita perlu melakukan delapan hal, yaitu:

1. Fokuskan pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan dan strategi dalam sektor publik.
2. Gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi kegiatan taktis.
3. Manfaatkan pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) dalam menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi. Contoh *best practices* antara lain: di Australia <www1.maxi.com.au>, di Singapura <www.ecitizen.gov.sg>, di AS yang ditangani swasta <www.ezgov.com> dan <www.govworks.com>.
4. Tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan teknologi informasi yang menjanjikan (mempunyai harapan keberhasilan).
5. Lindungi privasi dan sekuriti.
6. Bentuk dan kembangkan kerjasama berkaitan dengan teknologi informasi untuk mendorong pembangunan ekonomi.
7. Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat.
8. Persiapkan diri terhadap berkembangnya demokrasi *digital* (demokrasi dalam era *digital*).

Tindakan ke 1 sampai 4 mendukung transisi ke layanan elektronik, sedangkan tindakan ke 5 sampai 8 akan menjawab tantangan yang sedang timbul dalam pemerintahan.

Melengkapi kiat-kiat di atas, menurut **Accenture** dalam Djunaedi (2002), ada lima karakteristik *e-Government* yang unggul, yaitu:

1. Visi dan Implementasi: mempunyai visi sejak awal dan mekanisme implementasi yang baik/tepat.

2. Berorientasi ke Pengguna/Warga masyarakat: pada umumnya, di awal pengembangan *e-Government*, informasi yang dipublikasikan disusun dan diorganisasikan dengan mempertimbangkan cara pemerintah bekerja dan memberikan layanan secara fisik. Pada *e-Government* yang unggul, layanan kepada publik atau warga masyarakat dirancang dengan mempertimbangkan kemauan dan cara berpikir masyarakat umum, bukan berdasar cara kerja lembaga-lembaga pemerintah. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah lewat *e-Government*, masyarakat tidak perlu tahu struktur organisasi dan tata laksana pemerintah. Misal: untuk aplikasi IMB, cukup diklik tombol aplikasi, yang juga untuk layanan aplikasi-aplikasi lainnya (tidak perlu tahu instansi yang mengurusinya lalu mengklik tombol instansi tersebut).
3. Menggunakan Manajemen Hubungan Masyarakat (*Customer Relationship Management/ CRM*): Humas pemerintahan bergeser fungsinya bagaikan humas dalam perusahaan jasa, dengan menggunakan teknik-teknik manajemen informasi pengguna jasa, pemasaran, meminimalkan duplikasi pengumpulan informasi dan pembuatan profil perilaku pengguna jasa dalam rangka memprediksi kebutuhan di masa depan.
4. Volume dan Kompleksitas/kerumitan: mampu menangani volume informasi yang besar dengan kompleksitas tinggi (tapi masih nyaman dan nampak sederhana atau tidak rumit bagi pengguna).
5. Penggunaan Portal sebagai satu pintu masuk: memudahkan bagi pengguna/warga masyarakat dengan tidak perlu mengunjungi situs tiap instansi, cukup satu situs sebagai pintu masuk (portal) untuk mendapatkan semua layanan yang diperlukan. Contoh: *eCitizen* Portal layanan dari Pemerintah Singapura untuk warganya (www.ecitizen.gov.sg).

Lebih lanjut **Accenture** menyarankan:

1. Tujuan yang pada awalnya dipasang sering lebih cepat tercapai, sehingga perlu ditetapkan tujuan yang lebih menantang dan memotivasi pengembangan lebih lanjut. Contohnya: tujuan yang paling “dangkal” yang menyebutkan setiap instansi mempunyai situs web akan segera tercapai dalam waktu singkat. Bila tujuan dirumuskan untuk jangka panjang, maka perlu rumusan sasaran-sasaran atau tujuan antara.
2. Agar cepat mencapai keunggulan, *e-Government* perlu dikembangkan dengan strategi “berpikir besar, mulai dengan yang kecil, dan ditingkatkan secara cepat” (*thinking big, starting small and scaling fast*).

Sedangkan, Strategi *E-Government* Berdasarkan **Inpres No.**

3 Tahun 2003, bahwa:

- | | |
|-----------|--|
| Tahap 1 – | Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. |
| Tahap 2 – | Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif. |
| Tahap 3 – | Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronik layanan publik. |
| Tahap 4 – | Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan <i>Government to Government (G2G)</i> , <i>Government to Business (G2B)</i> , <i>Government to Consumers (G2C)</i> . |

Menurut Kebijakan Dan Strategi Pengembangan *e-Government* **Kementerian Komunikasi dan Informasi** pencapaian tujuan strategis *e-Government* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

Selain itu, menurut **Indrajit** (2005:18) paling tidak ada 6 (enam) komponen penting harus diperhatikan dalam penerapan *e-Government*, masing-masing diantaranya :

1. *Content Development*, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan *user interface*, dan lain sebagainya;
2. *Competency Building*, menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan;
3. *Connectivity*, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana *e-Government* diterapkan;
4. *Cyber Laws*, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum
5. yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas *e-Government*;
6. *Citizen Interfaces*, menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (*multi access channels*) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder e-Government* dimana saja dan kapan saja mereka inginkan;
7. *Capital*, menyangkut pola permodalan proyek *e-Government* yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, di sini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan

(*revenue model*) yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.

Berdasarkan **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika** bahwa obyek layanan aplikasi *e-Government* dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. *Government to Government* (Pemerintah untuk Pemerintah)
Aplikasi *e-Government* dalam kategori ini menangani masalah layanan antar instansi pemerintah dan/atau antar negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. pada umumnya aplikasi jenis *Government to Government* bekerja di atas satu jaringan data yang disebut sebagai intranet yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintah. Beberapa contoh aplikasi *Government to Government* antara lain :
 - a. Koordinasi dan konsolidasi anggaran;
 - b. Koordinasi kepegawaian;
 - c. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi;
 - d. Koordinasi bidang politik dan keamanan.
2. *Government to Citizen* (Pemerintah untuk Masyarakat)
Aplikasi *e-Government* dalam kategori ini menangani masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga negara indonesia maupun warga negara asing. beberapa contoh aplikasi *Government to Citizen* antara lain:
 - a. Kependudukan;
 - b. Keimigrasian;
 - c. Akta nikah.
3. *Government to Business* (Pemerintah untuk Pihak bisnis)
Aplikasi *e-Government* dalam kategori ini menangani masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berupa berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional maupun asing. Beberapa contoh aplikasi *Government to Business* antara lain :
 - a. Pembayaran pajak;
 - b. Perijinan usaha;
 - c. Pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*).

Dari beberapa definisi *e-Government* di atas, maka *e-Government* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi secara *online* dengan menggunakan internet atau perangkat lainnya yang dikelola oleh Pemerintah untuk mentransformasikan informasi kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan sesama pihak-pihak pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.

2.1.3 Manfaat E-Government

Adapun Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek (Kementerian Komunikasi Dan Informasi, 2002), sebagai berikut :

1. *E-Leadership*, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara didalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat

dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Lebih lanjut **Al Gore dan Toni Blair** (Andrianto, 2007 :

46) Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya *E-Government* ialah :

1. Memberikan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan industri), terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai kehidupan negara.
2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber – sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang dihadapi secara cepat dan cepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (kebijakan publik) secara merata dan demokratis.

Sementara menurut **Indrajit** (2006:41) ada 4 konsep yang berlaku di dalam *E-Government* itu sendiri, konsep-konsep tersebut adalah :

1. *Government To Citizen*
Dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
2. *Government To Business*
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya adalah proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan pihak swasta.
3. *Government To Government*
Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintahan lain setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diploma semata, namun lebih jauh lagi untuk mempelancar kerjasama.
4. *Government To Employees*
Pada akhirnya aplikasi *e-Government* juga diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang

mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, *passing grade*, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* atau bahkan *video conferencing*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya. (Raharjo, 2001:1)

Nugroho (2007) menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam *e-Government stakeholder* adalah berbagai pihak yang merasa berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap penyelenggaraan *e-Government*, antara lain :

1. Pemerintahan
Pihak pertama yang menjadi *stakeholder* adalah pemerintah itu sendiri, baik yang berada di tingkat pusat dan daerah
2. Perguruan tinggi
Perguruan tinggi merupakan pusat dari tenaga ahli dan ilmu pengetahuan diberbagai bidang dalam sebuah negara
3. Industri swasta
Hasil riset dari perguruan tinggi biasanya dibeli dan dikembangkan oleh industri untuk menghasilkan berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi yang secara masal diproduksi dan diperdagangkan ke berbagai pihak yang membutuhkan.
4. Lembaga non-komersial
Pihak keempat adalah berbagai lembaga non komersial semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, penghimpunan, asosiasi dan institusi *non-profit* lainnya yang akan berfungsi sebagai sebagai pemantau dan evaluator dari implementasi *e-Government*
5. Masyarakat

Merupakan subjek penting yang pada akhirnya akan merasakan manfaat *e-Government*. Sehingga yang menilai berhasil atau tidaknya sebuah implementasi *e-Government* adalah masyarakat/pelanggan. Konteks masyarakat ini pun dapat diperluas termasuk elemen di atas karena elemen tersebut pun bernaung dalam sebuah negara.

Dari uraian di atas, maka manfaat penerapan *e-Government* pada instansi pemerintahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku bisnis, adanya transparansi dikalangan pemerintah, mempercepat pelayanan, meningkatkan partisipasi dan kontrol publik, penghematan biaya dan memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

2.1.4 Tujuan E-Government

Setiawati (2007) mengungkapkan bahwa tujuan dari penerapan *e-Government* adalah sebagai berikut :

“Konsep *e-Government* di terapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan aman dan nyaman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintah itu sendiri. Selain itu tujuan penerapan *e-*

Government adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik”.

Menurut **Nugroho** (2007) tahapan perkembangan implementasi *e-Government* di Indonesia dibagi menjadi 4(empat) tahap yaitu :

1. *Web Presence* (memunculkan *website* daerah di internet, dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam *website* pemerintah).
2. *Interaction* (*website* daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah, dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi *email* dalam *website* pemerintah).
3. *Transaction* (*website* daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah).
4. *Transformation* (dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar pemerintah, sektor non pemerintah, serta sektor swasta).

Hasibuan (2008) menerangkan di dalam pengembangan *e-Government* di Indonesia, *e-Government* juga menghadapi berbagai macam kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran (*awareness*) dalam mengambil keputusan telematika.
2. Langkanya SDM yang berkualitas
3. Masih minimnya infrastuktur telekomunikasi
4. Tarif internet yang masih mahal.

Menurut **Supangkat** (2007) menerangkan tentang hambatan-hambatan dalam pengimplementasian *e-Government* di Indonesia, sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah dalam integrasi dan transparansi publik
2. Belum adanya budaya berbagi informasi
3. Belum adanya budaya dokumentasi yang tertib
4. Resistensi terhadap perubahan
5. Kelangkaan SDM yang handal
6. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal
7. Tempat akses yang terbatas

Menurut **OECD** dalam **Budiati** (2004:21) menyatakan bahwa ada 4 faktor utama dalam penerapan *e-Government* yaitu :

1. *Vision of political will, is divided into leadership, commitment and integration.* (visi atau keinginan yang terbagi menjadi kepemimpinan, komitmen, dan integritas).
2. *Common frameworks, is divided into inter-agency collaboration and financing* (kerangka kerja yang terbagi menjadi kolaborasi antar keuangan).
3. *Customer focus, is divided into access, choice, citizen engagement, and privacy.* (fokus kepada pelanggan yang terbagi menjadi akses, pilihan, penampilan masyarakat, rahasia).
4. *Responsibility is divided into accountability, monitoring and evaluation.* (pertanggungjawaban yang terbagi ke dalam akuntabilitas, *monitoring* dan evaluasi)

Sedangkan menurut **United Nation** dalam Budiati (2003:21), menyatakan bahwa ada 7 faktor kunci di dalam penerapan *e-Government* yaitu :

1. *Legal framework*, berkaitan dengan produk hukum dan keberadaan peraturan - peraturan yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan *e-Government*.
2. *Infrastructure*, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan *e-Government*
3. *The strength of human capital*, berkaitan dengan pengadaan SDM dalam mendukung pelaksanaan *e-Government*
4. *Coordination*, berkaitan dengan koordinasi yang ada dalam mendukung pelaksanaan *e-Government*
5. *Privacy*, salah satu prinsip yang penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap data-data dan informasi yang mereka berikan. Adanya privasi yang terlindungi akan memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mendapatkan layanan *online* sekaligus mendorong partisipasi yang lebih besar dari mereka.
6. *Security*, aspek keamanan berhubungan dengan bagaimana dokumen, file, dan berbagai informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Aspek keamanan data menjadi faktor penting dalam pengembangan *e-Government*, karena kalau saja informasi atau data disalahgunakan maka akan menimbulkan gejala negatif yang diinginkan.
7. *Civil service*, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan *e-Government*.

Dari berbagai teori-teori di atas, peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan *e-Government* secara garis besar merupakan kemampuan organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan segala sumber daya yang ada secara tepat guna mencapai tujuan organisasi tersebut dalam bentuk interaksi antara pemerintah dan *stakeholder*-nya (masyarakat, dan pihak lainnya yang berkepentingan terhadap

penggunaan *e-Government*) untuk meningkatkan pelayanan yang prima dengan lebih transparan dan akuntabel mendukung terciptanya *Good Government*.

2.2 Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :

Berdasarkan definisi konseptual dan oprasional, *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui *multi-channel*, diantaranya internet, *mobile communication*, dan *telephone* dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, *transparansi*, dan *akuntabilitas* penyelenggaraan Pemerintahan. dengan adanya penerapan *e-Government* di instansi Pemerintahan dapat tersosialisasinya berbagai informasi mengenai potensi daerah dan informasi seputar kegiatan pemerintahan sehingga mempermudah masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya dalam mengakses informasi yang telah disediakan.

Di dalam penerapan *e-Government* itu sendiri khususnya di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten masih banyak hambatan yang terjadi, antara lain yaitu : Pengadaan data dan informasi kurang pada *website*, kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam teknologi

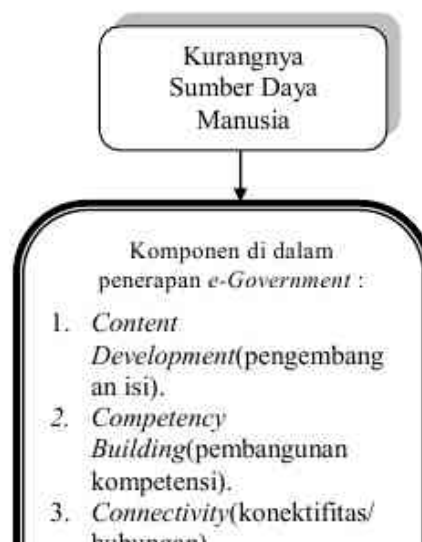
informasi, *Culture* dari aparat pemerintah yang masih bersifat traditional, kurangnya fasilitas komputer sehingga menghambat proses kerja para pegawainya, Kurangnya perawatan dari infrastruktur (sarana dan prasarana) *e-Government*.

Untuk mengetahui berapa besar penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi , peneliti menggunakan indikator dari teori **Indrajit** (2005:18) , bahwa dalam penerapan *e-Government* mengandung enam indikator yaitu : *Content Development*, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan *user interface*, dan lain sebagainya. *Competency Building*, menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan. *Connectivity*, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana *e-Government* diterapkan. *Cyber Laws*, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan aktivitas *e-Government*. *Citizen Interfaces*, menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (*multi access channels*) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder e-Government* dimana saja dan kapan saja mereka inginkan. *Capital*, menyangkut pola permodalan proyek *e-Government* yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, di sini

tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir ini dapat dilihat melalui bagan berikut ini :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir





2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat dibuat hipotesis dari penelitian. Menurut **Sugiyono** (1994:39) mengatakan bahwa hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis menurut peneliti dalam penelitian ini bahwa pengimplementasian *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten masih kurang maksimal. Peneliti memprediksi hipotesis tersebut paling tinggi 75% dari nilai ideal yaitu 100%.

Ho : $\rho \leq 75\%$

Memprediksikan μ_0 lebih rendah atau sama dengan 75% dari nilai ideal yaitu 100%.

Ha : $\rho \geq 75\%$

Memprediksikan μ_0 lebih besar atau sama dengan 75% dari nilai ideal yaitu 100%.

Melihat dari dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu hipotesis untuk penelitian skripsi ini bahwa :

H_0 : $\rho \leq 75\%$

Memprediksikan μ_0 lebih rendah atau sama dengan 75% dari nilai ideal yaitu 100%.

Sehingga peneliti memprediksikan bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi kurang maksimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2007:1). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2007:11).

3.2 Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh karenanya, dalam melakukan pengukuran maka memerlukan alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2004:14). Untuk mempermudah menemukan jawaban atas masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini peneliti sajikan oprasional variabel dalam bentuk kisi-kisi instrumen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Sub indikator	No Item
1. <i>E-Government</i> dalam Indrajit	<i>Content Development</i> (pengembangan isi)	1. Pengembangan aplikasi 2. Spesifikasi sistem basis data	1,2 3,4,5

(2005:18)	<i>Competency Building</i> (pembangunan kompetensi)	- Pengadaan SDM - Pelatihan dan pengembangan kompetensi	6,7 8
	<i>Connectivity</i> (konektifitas/hubungan)	Kesediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi	9,10
	<i>Cyber Laws</i> (peraturan dan undang-undang <i>cyber</i>)	Keberadaan kerangka dan prangkat hukum	11,12, 13,14
	<i>Citizen Interfaces</i> (interaksi pengguna)	Pengembangan kanal akses yang dapat di pergunakan oleh seluruh masyarakat dah <i>stakeholders</i>	15,16,17, 18,19
	<i>Capital</i> (modal)	Biaya yang digunakan dalam penerapan <i>e-Government</i>	20,21

Instrument yang digunakan pada penelitian ini berbentuk angket, dengan satu variabel, yaitu variabel *e-Government*. Sedangkan skala pengukuran instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007:107). Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skor dalam Penelitian

Jawaban	Skor
A	4
B	3
C	2
D	1

Sumber : Sugiyono, 2005

3.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004:90). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, yang terdiri dari 86 orang pegawai.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ada di lapangan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota organisasi digunakan sebagai sampel, yakni keseluruhan pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

3.4 Sumber Data Yang Diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperoleh atau digunakan dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber data sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel atau responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber artikel-artikel (tentang *e-Government*) dan gambar-gambar, yang dapat berbentuk buku-buku, dokumen , dan data elektronik (*website*).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

1. Observasi, serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti.
2. Wawancara terstruktur dengan instrumentnya berupa kuisisioner, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini angket diberikan kepada seluruh pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

3. Studi kepustakaan, yaitu studi atau teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan maupun jurnal-jurnal ilmiah.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus uji validitas ini adalah:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris *rely*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian, reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan (Purwanto, 2007:161). Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel

jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat/akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_j^2} \right)$$

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk agar mudah dipahami dan selanjutnya dipersentasikan. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kuantitatif yang diperlukan adanya penghitungan matematis atau teknik statis sebagai alat bantu analisis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah statistik deskriptif. Dimana statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Karena bentuk hipotesisnya adalah

deskriptif maka teknik uji untuk hipotesisnya adalah dengan menggunakan rumus t – test (untuk satu variable atau satu sampel).

Berikut adalah rumus pengujian hipotesis deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini yang menggunakan t -test (Uji T) :

Rumus :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Adapun lokasi atau tempat dilakukannya penelitian ini yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Alamat : Jl. Ki Ajourum, Cipocok Jaya Serang, Banten (42121). Tlp : (0254) 204016. *Website* : *distamben.banten.go.id*. Adapun jadwal penelitian peneliti dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian Peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

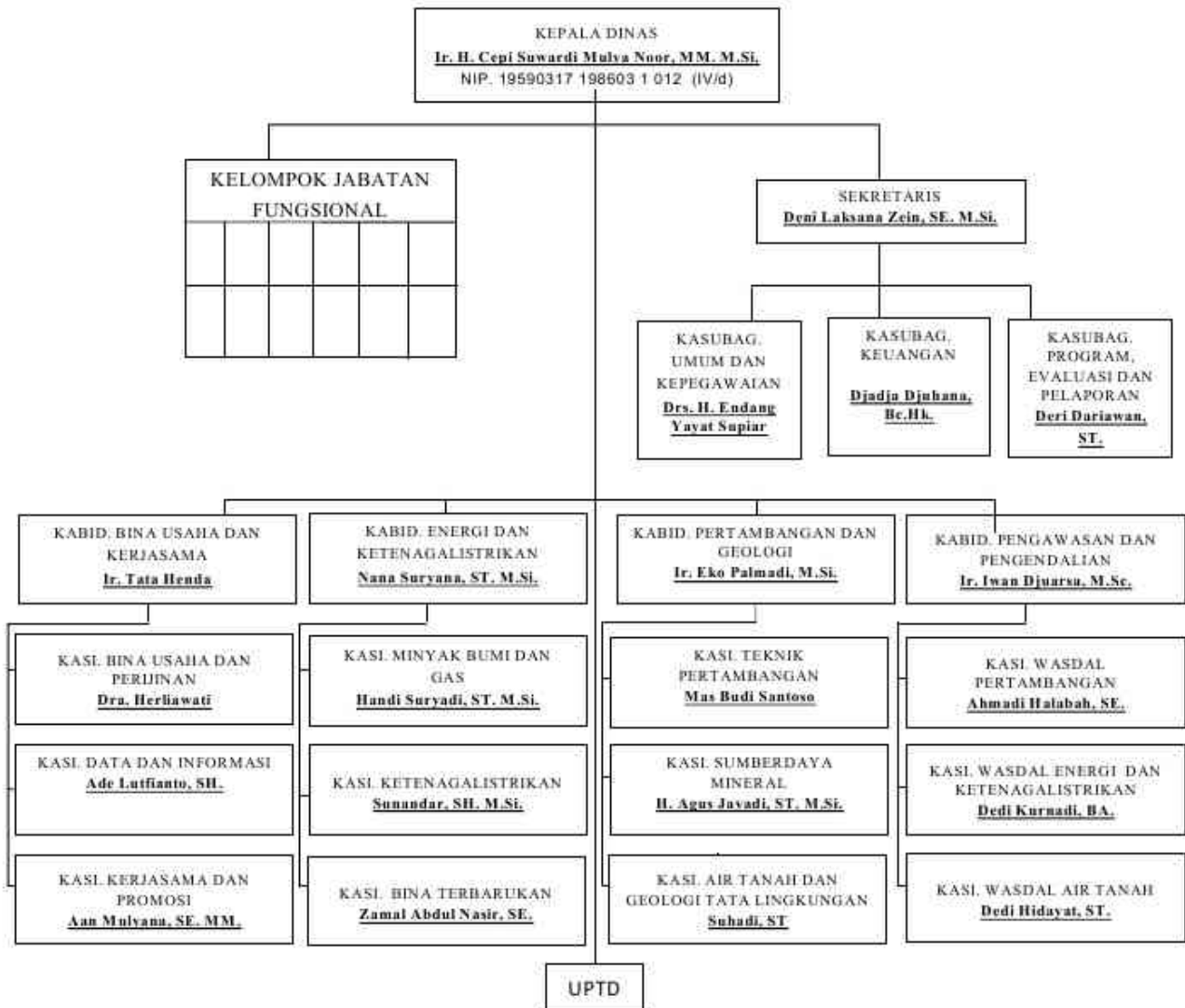
Provinsi Banten adalah provinsi yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki posisi wilayah yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi yang ada pada wilayah Provinsi Banten antara lain pada sektor Pariwisata, sektor Industri, dan sektor Pertambangan yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Banten. Potensi-potensi ini tidak hanya berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan potensi tersebut juga sampai berskala internasional.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten Bidang Pertambangan dan Energi yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Pertambangan dan Energi guna meningkatkan produktifitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang maksimal sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka penyelenggaraan, pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat maka seiring perkembangannya pada tanggal 03

Januari 2008 dikeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2003 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Banten. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (perda Nomor 16 Tahun 2002).

Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI DISTAMBEN PROVINSI BANTEN Tahun 2010
(Perda Provinsi Banten No.03 Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008)



Dalam susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari kepala dinas sebagai unsur pelaksana sampai kepada jenjang yang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok menetapkan rumusan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, kewenangan dekonsentrasi, dan pembangunan dalam bidang pertambangan dan energi.

2. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun bahan rumusan-rumusan rencana program, mengkoordinasikan, menerapkan, mengevaluasi, dan pelaporan, monitoring pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

3. Bidang Umum

Bidang umum mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang bina usaha dan kerjasama.

4. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang energi dan ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, perumusan kebijakan teknis operasional di bidang energi dan ketenagalistrikan.

5. Bidang Pertambangan dan Geologi

Bidang pertambangan dan geologi mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pertambangan dan geologi.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan dan pengendalian.

7. UPTD

Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di lapangan.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Untuk menjalankan tugas pokok sesuai dengan Perda Nomer 03 tahun 2008, pasal 35 (rincian susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi) diatur pula fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan Dan Energi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi
- Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah

- Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah provinsi banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan Banten yaitu "Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Takwa". Sejalan dengan itu Adapun visi dari Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten adalah " Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan "

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya – upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, khususnya pada misi-misi berikut :

- Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan menuju pada tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
- Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan
- Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha dan
- Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan tiga pintu keluar wilayah banten

Penerapan *e-Government* pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten, penerapannya masih pada tahap *Web Presence* yaitu memunculkan *website* daerah di internet, dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam *website* pemerintah (Nugroho, 2007). Sedangkan menurut INPRES No 3 tahun 2003 penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi ini masih pada tahap 1 yaitu persiapan. Sedangkan, berdasarkan *roadmad e-Government* Banten seharusnya pada tahun 2010 ini *e-Government* Banten sudah berjalan menuju tingkat 4 yaitu pemanfaatan. Seperti digambarkan pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 4.2



Sumber : Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Dan Telematika Provinsi Banten, DISHUBKOMINFO.

Pengadaan infrastruktur (sarana dan prasarana) dari *e-Government* berdasarkan data inventaris Dinas Pertambangan dan Energi, seperti digambarkan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 4.1

Infrastuktur Komputer	Jumlah
PC.unit, <i>notebook</i> , laptop dan personal komputer	52

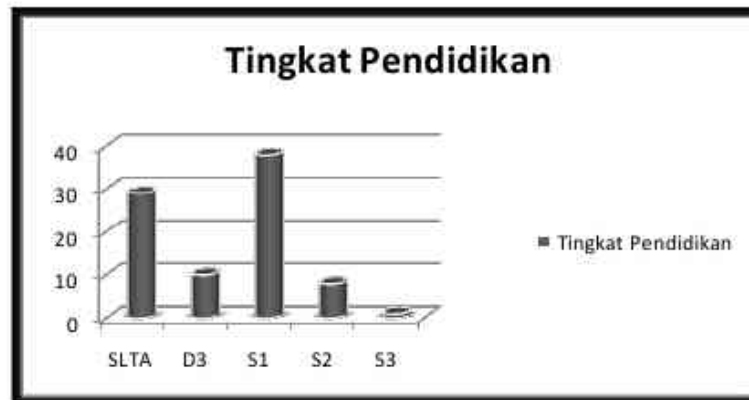
Sumber : LAKIP DISTAMBEN 2009

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Identitas Responden

Responden merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, terdiri dari 86 orang pegawai. Dari 86 orang pegawai tersebut, responden dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikannya. Berikut dipaparkan dalam bentuk tabel dan diagram, sebagai berikut :

Diagram 4.1
Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



(Sumber: Data diolah, 2010)

Dari diagram 4.1 di atas, diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) berjumlah 29 orang pegawai atau 33,7%, lulusan D3 (Diploma 3) berjumlah 10 orang pegawai atau 11,6 %, lulusan S1 (Strata 1) berjumlah 38 orang pegawai atau 44,2%, lulusan S2 (Strata 2) berjumlah 8 orang pegawai atau 9,3%, dan lulusan S3 (Strata 3) berjumlah satu orang pegawai atau sekitar 1%. Dari penjelasan tersebut bahwa pegawai yang bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten rata-rata sudah memiliki tingkat pendidikan yang baik yaitu lulusan S1 (Strata 1).

Dalam pengambilan jumlah responden, peneliti mengambil seluruh jumlah responden di Dinas Pertambangan dan Energi. Maka dari itu, peneliti menggunakan populasinya sebagai sampel, dalam penelitian ini

peneliti menggunakan teknik sampel jenuh dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Adapun jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuantitatif deskriptif, maka data yang diperoleh tidak hanya berbentuk kalimat (pernyataan) dari hasil wawancara dan pertanyaan dari hasil penyebaran kuesioner, akan tetapi juga dengan menjelaskan dari hasil penelitian yang berbentuk angka yang kemudian akan diolah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator dari teori **Indrajit** (2005:18) , bahwa dalam penerapan *e-Government* mengandung enam indikator yaitu : *Content Development* (pengembangan isi), *Competency Building* (pembangunan kompetensi), *Connectivity* (konektifitas/hubungan), *Cyber Laws* (peraturan dan undang-undang cyber), *Citizen Interfaces* (interaksi pengguna), *Capital* (modal).

Untuk penjelasan lebih mendalam analisis implementasi *e-Government* yang terkait dengan enam indikator di atas, peneliti menguraikan dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada para responden yaitu seluruh pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

4.2.2 Indikator *Content Development* (pengembangan isi)

Responden yang telah mengisi kuesioner adalah sebanyak 86 orang atau seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

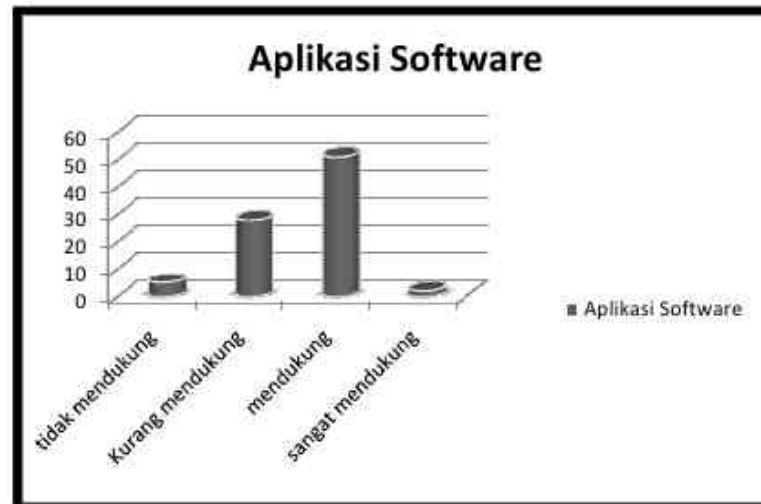
Tabel 4.2
Tanggapan Responden Mengenai *Software* Pendukung

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak mendukung	5	5,8	5,8	5,8
kurang mendukung	28	32,6	32,6	38,4
mendukung	51	59,3	59,3	97,7
sangat mendukung	2	2,3	2,3	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah 2010)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, yang menjelaskan mengenai *software* yang digunakan untuk mendukung implementasi *e-Government*, menurut jawaban responden sebanyak 86 orang pegawai atau seluruh pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten antara lain : jawaban responden yang tidak mendukung sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%, jawaban responden yang kurang mendukung sebanyak 28 orang pegawai atau 32,3%, jawaban yang mendukung sebanyak 51 orang pegawai atau 59,3%, dan jawaban sangat sangat mendukung sebanyak 2 orang pegawai atau 2,3%. Lebih jelasnya pada diagram di bawah ini :

Diagram 4.2
Tanggapan Responden Mengenai *Software* Mendukung
Proses Implementasi *E-government*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dari diagram 4.2 didapat jawaban mayoritas responden yang menjawab baik sebanyak 51 orang pegawai atau 59,3%. Dari jawaban tersebut diketahui bahwa sebagian besar perangkat *software* Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sudah didukung dengan baik walaupun dapat kita lihat *software* yang ada masih kurang menunjang dalam proses implementasi *e-Government*.

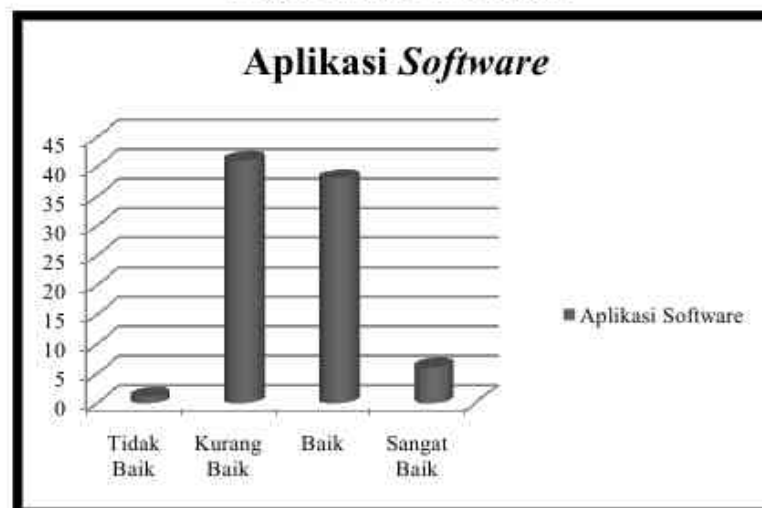
Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Aplikasi *Software* Terintegrasi
Dengan Sistem Yang Dipakai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid tidak baik	1	1,2	1,2	1,2
Kurang baik	41	47,7	47,7	51,2
baik	38	44,2	44,7	98,8
sangat baik	6	7,0	7,0	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, yang menjelaskan tentang aplikasi *software* dapat terintegrasi dengan sistem yang dipakai, menurut jawaban responden sebanyak 86 orang pegawai, antara lain : jawaban responden tidak baik sebanyak 1 orang pegawai, jawaban kurang baik sebanyak 41 orang pegawai, jawaban responden baik sebanyak 38 orang pegawai, dan jawaban yang sangat baik sebanyak 6 orang pegawai.

Diagram 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Aplikasi *Software* Terintegrasi Dengan Sistem Yang Dipakai



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dari diagram 4.3 di atas diketahui jawaban mayoritas responden yang menjawab kurang baik sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%. Dari jawaban tersebut kita dapat mengetahui bahwa aplikasi *software* yang digunakan dapat dikatakan kurang terintegrasi dengan baik, hal tersebut merupakan penghambat dari implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

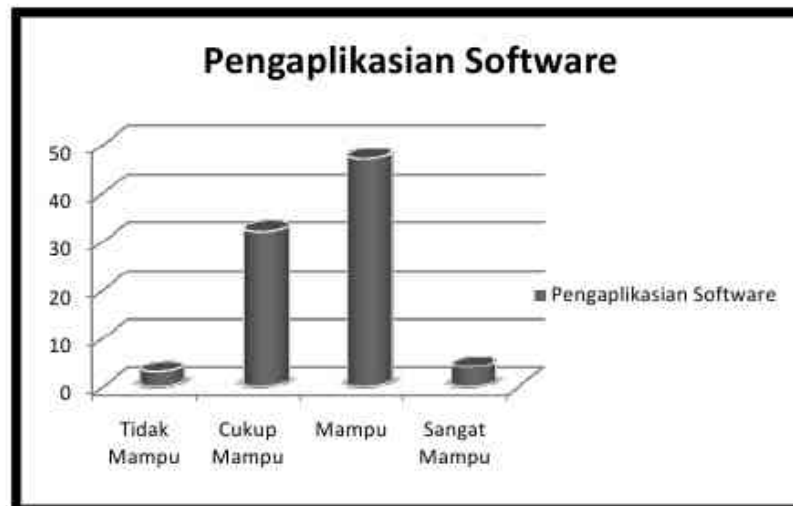
Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pengaplikasian
Software

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mampu	3	3,5	3,5	3,5
	cukup mampu	32	37,2	37,2	40,7
	mampu	47	54,7	54,7	95,3
	sangat mampu	4	4,7	4,7	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, mengenai kemudahan pengaplikasian *software* dalam mendukung proses implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Didapatkan jawaban dari responden diantaranya : tidak mampu sebanyak 3 orang pegawai atau 3,5%, jawaban cukup mampu sebanyak 32 orang pegawai atau 37,2%, jawaban mampu sebanyak 47 orang pegawai atau 54,7% dan jawaban responden yang jawaban sangat mampu sebanyak 4 orang pegawai atau 4,7%. Guna lebih jelasnya lihat diagram berikut:

Diagram 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pengaplikasian
Software Oleh Pegawai



(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan diagram 4.4 di atas dapat diketahui, jawaban mayoritas dari responden yaitu mampu sebanyak 47 orang pegawai atau 54,7%. Dalam penerapan *e-Government* aplikasi *software* yang digunakan tidak hanya *Office* saja, akan tetapi aplikasi-aplikasi lainnya pegawai pun harus mampu mengoperasikannya, seperti mengirim data melalui *e-mail* dan *chatting*. Dari jawaban responden dapat kita lihat bahwa pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sudah mampu mengaplikasikan *software-software* dalam mendukung proses penerapan *e-Government*, walaupun hal tersebut kurang maksimal dilakukan.

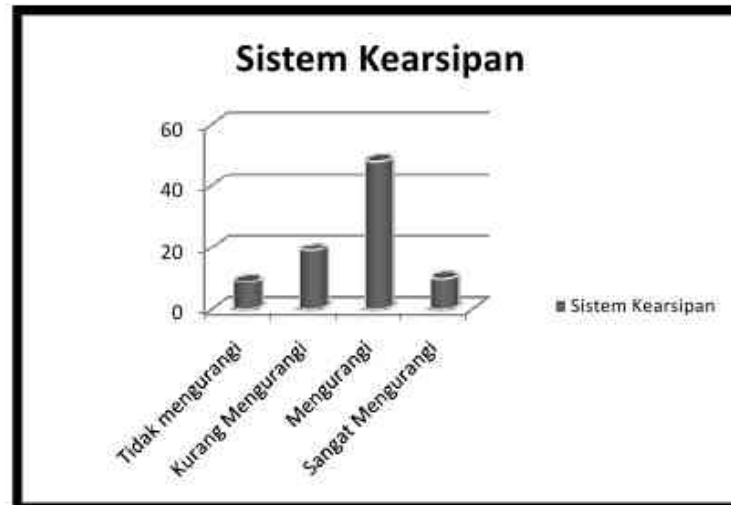
Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Sistem Kearsipan Secara Manual

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak mengurangi	9	10,5	10,5	10,5
kurang mengurangi	19	22,1	22,1	32,6
mengurangi	48	55,8	55,8	88,4
sangat mengurangi	10	11,6	11,6	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, mengenai sistem kearsipan secara manual. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden yang merupakan seluruh pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten, sebagai berikut : jawaban responden yang tidak mengurangi sebanyak 9 orang pegawai atau 10,5%, jawaban responden yang kurang mengurangi sebanyak 19 orang pegawai atau 22,1%, jawaban responden yang mengurangi sebanyak 48 orang pegawai atau 55,8% dan jawaban responden sangat mengurangi sebanyak 10 atau 11,5%. Dapat dilihat pada diagram 4.5 di bawah ini:

Diagram 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Sistem Kearsipan Secara Manual



(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan diagram 4.5 di atas dapat diketahui jawaban mayoritas responden yaitu mengurangi sebanyak 48 orang pegawai atau 55,8%. Dengan adanya penerapan *e-Government* di Provinsi Banten mengurangi sistem kearsipan yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dengan adanya penerapan *e-Government* ini adanya pengurangan dalam anggaran terutama dalam hal pembelian kertas print, seperti yang diutarakan oleh bapak Deri Dariawan, ST selaku Kasubag program, evaluasi dan pelaporan bahwa dengan adanya *e-Government* merupakan paradigma baru peralihan dari sistem analog kepada *electronic government (e-Government)* sehingga dalam penerapannya akan mengurangi penggunaan *paper list*.

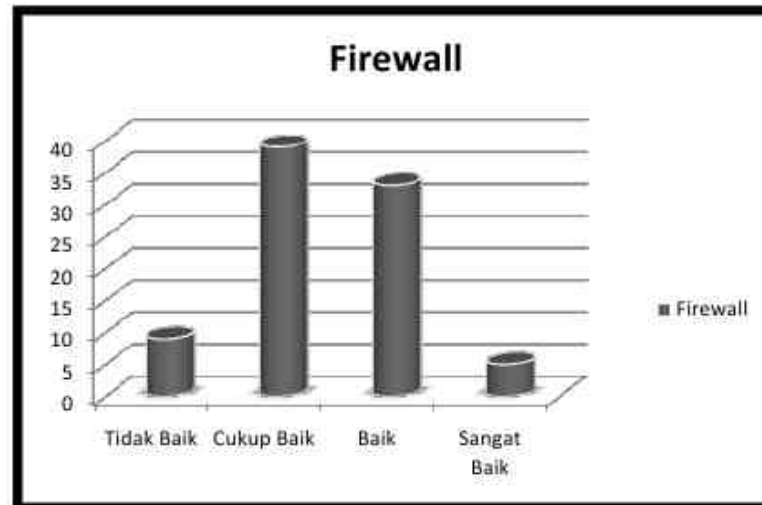
Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan *Firewall* (Sistem Keamanan)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak baik	9	10,5	10,5	10,5
	cukup baik	39	45,3	45,3	55,8
	baik	33	38,4	38,4	94,2
	sangat baik	5	5,8	5,8	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, mengenai penggunaan *firewall* untuk melindungi data pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, sebagai berikut : jawaban responden tidak baik sebanyak 9 orang pegawai responden atau 10,5%, jawaban responden cukup baik sebanyak 39 orang pegawai atau 45,3%, jawaban responden baik sebanyak 33 orang pegawai atau 38,4%, dan yang menjawab dengan jawaban sangat baik sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram di bawah ini :

Diagram 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan *Firewall* (Sistem Keamanan)



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dari jawaban responden mengenai penggunaan *Firewall* (sistem keamanan) diketahui mayoritas responden menjawab cukup baik dengan jumlah responden 39 orang pegawai atau 45,3%. Di dalam pengembangan *e-Government* keamanan akan data merupakan suatu yang penting, dikarenakan apabila data atau informasi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan sesuatu hal negatif yang tidak kita inginkan. Sistem keamanan digunakan untuk melindungi segala sesuatu yang berhubungan dengan *e-Government*, baik itu berupa suatu data, informasi, maupun sistem-sistem yang terkait dengan *e-Government*, dan juga agar tidak ada pihak-pihak yang merusak terhadap jaringan. Sistem keamanan yang digunakan yaitu dengan menggunakan *software Firewall*. *Firewall* adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antar dua jaringan. Secara prinsip

Firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme yang memblokir lalu lintas. *Firewall* dapat berfungsi melindungi jaringan dari masuknya jaringan pihak luar yang ingin mengacau. Akan tetapi, *Firewall* tak bisa melindungi dari serangan seseorang yang berada di dalam jaringan sendiri (Himat, 2008:1). Dengan demikian, sistem keamanan (*software firewall*) yang digunakan cukup baik dalam melindungi data-data pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten.

4.2.3 Indikator *Competency Building*(pengembangan kompetensi)

Dimensi ini menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan/pengadaan SDM dalam mendukung proses implementasi *e-Government*. tingkat kompetensi dan keahlian manusia tersebut akan sangat mempengaruhi proses dari penerapan *e-Government*. Karena Sumber daya manusia di Pemerintahlah yang akan menjadi "pemain utama" atau subyek dalam inisiatif *e-Government* (Indrajit, 2005:8).

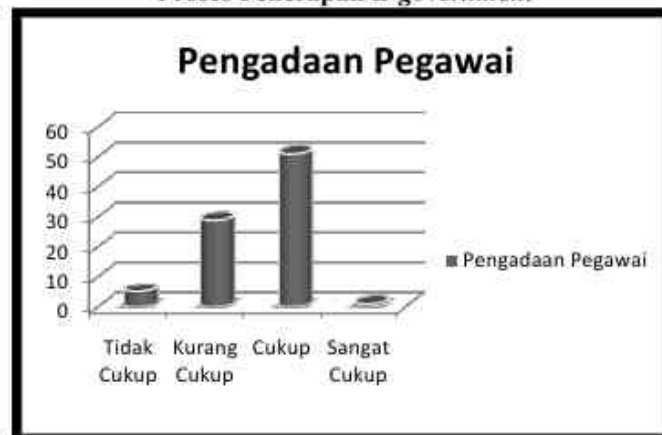
Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Pengadaan Jumlah Pegawai Menunjang
Proses Penerapan *E-government*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak cukup	5	5,8	5,8	5,8
kurang cukup	29	33,7	33,7	39,5
cukup	51	59,3	59,3	98,8
sangat cukup	1	1,2	1,2	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, mengenai pengadaan pegawai dalam menunjang proses penerapan *e-Government*. Didapatkan jawaban dari 86 orang pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sebagai responden diantaranya : jawaban tidak cukup sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%, jawaban kurang cukup sebanyak 29 orang pegawai atau 33,7%, jawaban cukup sebanyak 51 orang pegawai atau 59,3% dan jawaban sangat cukup sebanyak 1 orang pegawai atau 1,2%.

Diagram 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Pengadaan Jumlah Pegawai Menunjang
Proses Penerapan *E-government*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Jawaban mayoritas responden diatas yaitu cukup sebanyak 51 orang pegawai atau 59,3%. Dapat kita lihat bahwa ketersediaan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dapat dikatakan cukup dengan kebutuhan yang ada.

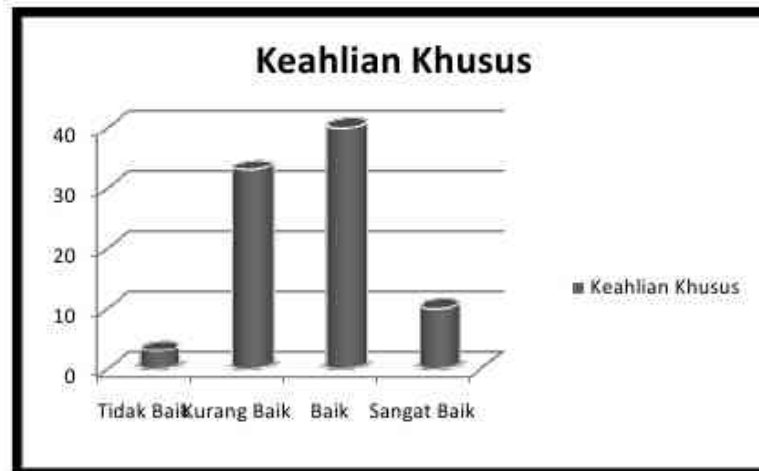
Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Pengadaan Pegawai Yang
Memiliki Keahlian Khusus TI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak baik	3	3,5	3,5	3,5
kurang baik	33	38,4	38,4	41,9
baik	40	46,5	46,5	88,4
sangat baik	10	11,6	11,6	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, mengenai pengadaan pegawai yang memiliki keahlian khusus dalam mendukung proses penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Didapatkan jawaban dari 86 orang pegawai yang bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, yaitu jawaban yang tidak baik sebanyak 3 orang pegawai atau 3,5%, jawaban yang kurang baik sebanyak 33 orang pegawai atau 38,4%, jawaban yang baik sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5% dan jawaban responden yang sangat baik sebanyak 10 orang pegawai atau 11,6%. Lebih jelasnya pada diagram 4.8 di bawah ini:

Diagram 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Pengadaan Pegawai Yang
Memiliki Keahlian Khusus TI



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui jawaban mayoritas pegawai yaitu baik sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5% . Semakin baik pengadaan pegawai yang memiliki keahlian khusus, maka semakin baik pula proses penerapan *e-Government* akan berlangsung.

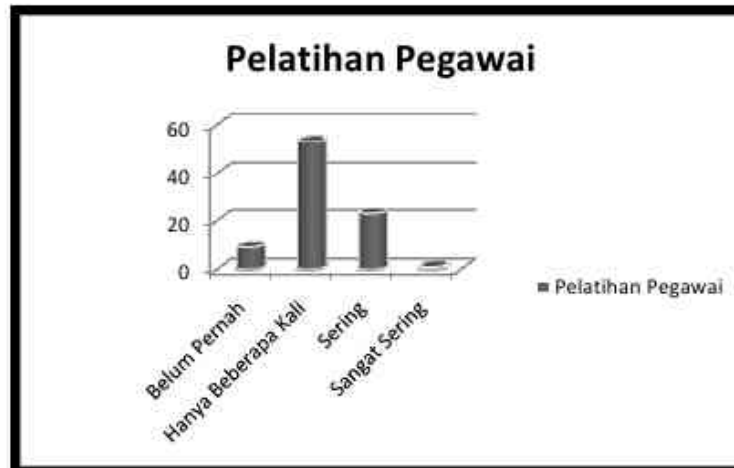
Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Frekuensi Pelatihan Para Pegawai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	belum pernah	9	10,5	10,5	10,5
	hanya beberapa kali	53	61,6	61,6	72,1
	sering	23	26,7	26,7	98,8
	sangat sering	1	1,2	1,2	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, mengenai frekuensi pelaksanaan pelatihan para pegawai dalam mendukung pengembangan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Didapatkan jawaban responden, antara lain : yang menjawab tidak pernah sebanyak 9 orang pegawai atau 10,5%, jawaban hanya beberapa kali sebanyak 53 orang pegawai atau 61,6%, jawaban sering sebanyak 23 orang pegawai atau 26,7%, sedangkan 1 orang responden yang menjawab sangat sering dalam pelaksanaan pelatihan pegawai atau 1,2%. Lebih jelasnya pada diagram 4.9 di bawah ini:

Diagram 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Frekuensi Pelatihan Para Pegawai



(Sumber : Data diolah, 2010)

Jawaban mayoritas responden yaitu pelatihan para pegawai hanya dilakukan beberapa kali, dengan jawaban responden sebanyak 53 orang pegawai atau 61,6%. Dapat dikatakan bahwa pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai tidak maksimal sehingga menghambat penerapan *e-Government* pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

4.2.4 Indikator *Connectivity*(konektifitas / hubungan)

Indikator *Connectivity* (konektifitas / hubungan) yaitu meliputi ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana *e-Government* diterapkan. Ini juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan Teknologi ICT (*Information Communication Technology*) yang diantaranya seperti, sarana komputer maupun jaringan komunikasi (LAN, WAN, *Internet*).

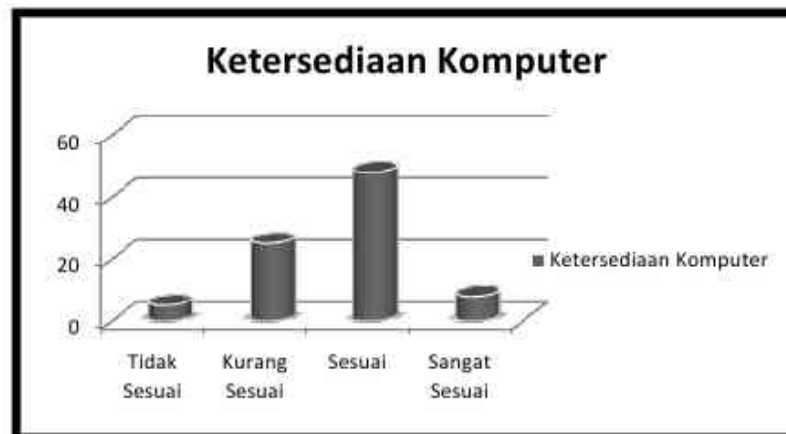
Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Ketersediaan Komputer
Di DISTAMBEN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai	5	5,8	5,8	5,8
	kurang sesuai	25	29,1	29,1	34,9
	sesuai	48	55,8	55,8	90,7
	sangat sesuai	8	9,3	9,3	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, mengenai ketersediaan komputer di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten didapatkan jawaban responden dari 86 orang pegawai. jawaban responden yang tidak sesuai sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%, jawaban yang kurang sesuai sebanyak 25 orang pegawai atau 29,1%, jawaban responden sesuai sebanyak 48 orang pegawai atau 55,8%, dan Jawaban responden sangat sesuai sebanyak 8 orang pegawai. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.10 berikut :

Diagram 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Ketersediaan Komputer
Di DISTAMBEN Provinsi Banten



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dari jawaban responden yang mayoritas menjawab sesuai sebanyak 48 orang pegawai atau 55,8%, maka dapat diketahui bahwa jumlah ketersediaan perangkat komputer Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten telah sesuai dengan kebutuhan. Perangkat komputer sangatlah penting, sebagai alat pendukung dalam melakukan pekerjaan, selain itu komputer juga merupakan jaringan komunikasi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan hubungan dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini aparat pemerintah lainnya, pihak swasta, dan masyarakat.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Perangkat Komputer
Dengan Jaringan Internet

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak baik	3	3,5	3,5	3,5
	kurang baik	32	37,2	37,2	40,7
	baik	44	51,2	51,2	91,9
	sangat baik	7	8,1	8,1	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, mengenai kesesuaian perangkat komputer dengan jaringan internet di SKPD Provinsi Banten dalam mendukung proses implementasi *e-Government*. Didapatkan jawaban yang tidak baik sebanyak 3 orang pegawai atau 3,5%, jawaban kurang baik sebanyak 32 orang pegawai atau 37,2%, jawaban baik sebanyak 44 orang pegawai atau 51,2% dan jawaban yang sangat baik sebanyak 7 orang pegawai atau 8,1%. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.11 berikut :

Diagram 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Perangkat Komputer
Dengan Jaringan Internet



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat kita ketahui, jawaban mayoritas responden mengatakan kesesuaian perangkat komputer dengan jaringan internet yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten rata-rata sudah dapat dikatakan baik dengan jumlah responden sebanyak 44 orang pegawai atau 51,2%. Dengan didukung adanya kesesuaian komputer setiap SKPD, maka dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten akan lebih mudah dikarenakan faktor pendukungnya sudah terpenuhi.

4.2.5 Indikator *Cyber Laws*(peraturan dan undang-undang *Cyber*)

Cyber law menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluruh aktivitas *e-Government*. pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat/daerah serta masyarakat luas, agar terjalin suatu sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan kerangka/perangkat hukum dan peraturan – peraturan, sebagai standarisasi dan panduan (pedoman) akan sangat mendukung penerapan *e-Government*.

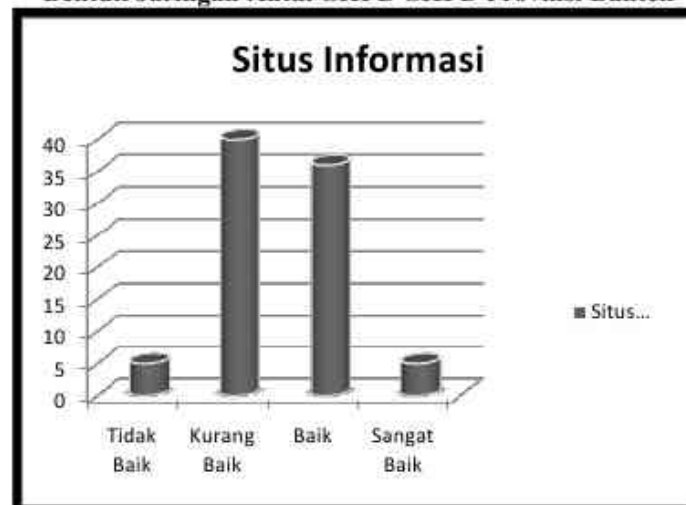
Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Situs Informasi Di Setiap SKPD Sebagai
Bentuk Jaringan Antar SKPD-SKPD Provinsi Banten

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak baik	5	5,8	5,8	5,8
	kurang baik	40	46,5	46,5	52,3
	baik	36	41,9	41,9	94,2
	sangat baik	5	5,8	5,8	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menjawab situs informasi di Dinas Pertambangan dan Energi tempat responden bekerja yang menjawab tidak baik sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%, jawaban kurang baik sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5%, jawaban baik sebanyak 36 orang pegawai atau 41,9%, dan menjawab sangat baik sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%. Seperti pada diagram 4.12 berikut ini :

Diagram 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Situs Informasi Di Setiap SKPD Sebagai
Bentuk Jaringan Antar SKPD-SKPD Provinsi Banten



(Sumber : Data diolah, 2010)

Mayoritas responden menjawab kurang baik sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa situs informasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten masih kurang baik, karena masih banyak *link* pada *website* Dinas Pertambangan dan Energi yang tidak *uptodate* bahkan ada *link* yang masih kosong tidak ada informasi di dalamnya sehingga penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kurang maksimal.

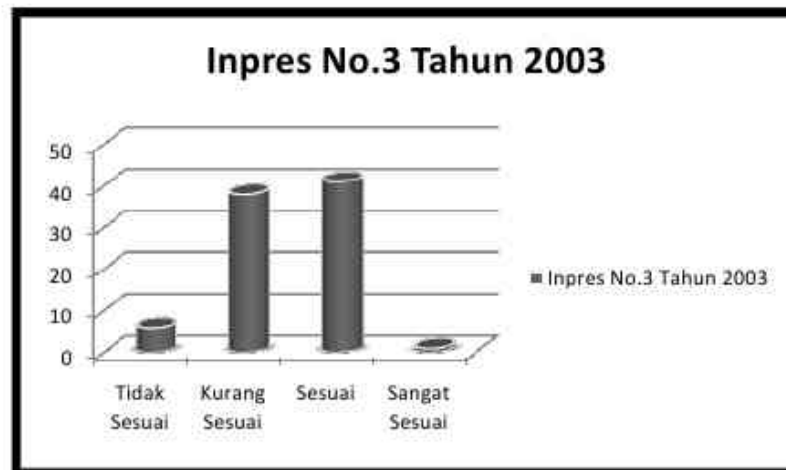
Tabel 4.13
Tanggapan Responden Mengenai Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai	6	7,0	7,0	7,0
	kurang sesuai	38	44,2	44,2	51,2
	sesuai	41	47,7	47,7	98,8
	sangat sesuai	1	1,2	1,2	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, mengenai Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 menjelaskan adanya situs SKPD dibuat untuk informasi publik yang interaktif. jawaban responden yang tidak sesuai sebanyak 6 orang pegawai atau 7,0%, jawaban yang kurang sesuai sebanyak 38 orang pegawai atau 44,2% jawaban yang sesuai sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%, dan jawaban responden yang sangat sesuai sebanyak 1 orang pegawai atau 1,2%. Untuk lebih jelasnya pada diagram berikut :

Diagram 4.13
Tanggapan Responden Mengenai Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui, responden mayoritas menjawab sesuai sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam pengimplementasian *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, sudah sesuai mengikuti dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* merupakan sebuah instruksi yang ditujukan kepada aparatur pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing aparatur pemerintah guna terlaksananya pengembangan *e-Government* baik di pusat maupun di daerah yang berpedoman dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003.

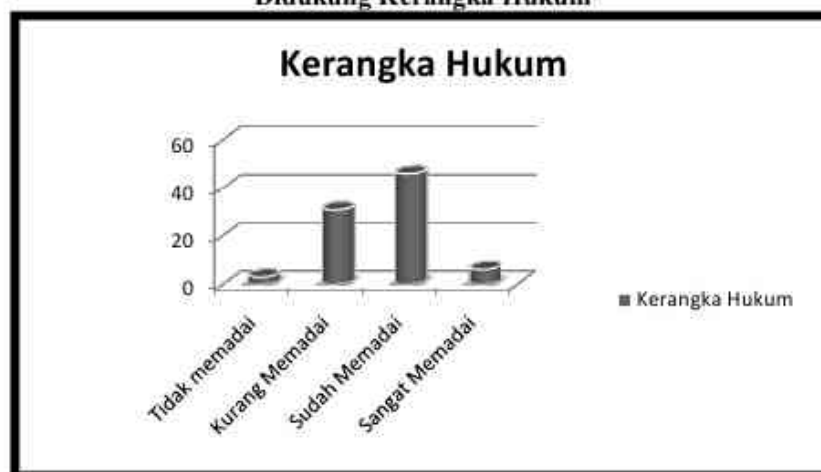
Tabel 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Implementasi *e-Government* Sudah Didukung Kerangka Hukum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak memadai	3	3,5	3,5	3,5
	kurang memadai	31	36,0	36,0	39,6
	sudah memadai	46	53,5	53,5	93,0
	sangat memadai	6	7,0	7,0	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, mengenai pencapaian tujuan strategis *e-Government* di Provinsi Banten sudah didukung dengan kerangka hukum. Didapatkan jawaban tidak memadai sebanyak 3 orang pegawai atau 3,5%, jawaban kurang memadai 31 orang pegawai atau 36%, jawaban sudah memadai sebanyak 46 orang pegawai atau 53,3%, dan jawaban responden sangat memadai sebanyak 6 orang pegawai atau 7,0%. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.14 berikut :

Diagram 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Implementasi *e-Government* Sudah Didukung Kerangka Hukum



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat kita ketahui mayoritas responden menjawab sudah memadai sebanyak 46 orang pegawai atau 53,3%. Dalam implemementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sudah didukung oleh kerangka hukum dengan adanya Peraturan Gubernur Banten No.34 tahun 2008 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (Rip-Sitel) Pemerintah Provinsi Banten, dan Peraturan Gubernur Banten No.35 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk dan Standarisasi Penyelenggaraan *Digital Government Service (DGS)* Pemerintah Provinsi Banten. Dalam pengimplementasian *e-Government* sangatlah diperlukan landasan hukum atau sebuah peraturan yang digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan suatu program dalam hal ini pelaksanaan program *e-Government*.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Gubernur No.35 Tahun 2008
Tentang Rencana Induk dan Standarisasi *Digital Government Service (DGS)*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai	1	1,2	1,2	1,2
	kurang sesuai	29	33,7	33,7	34,9
	sesuai	53	61,6	61,6	96,5
	sangat sesuai	3	3,5	3,5	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, mengenai tujuan dari Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah, dengan memaksimalkan pelayanan publik, penertiban pajak dan retribusi yang sesuai dengan penjelasan dalam

Peraturan Gubernur No.35 Tahun 2008. Didapatkan jawaban responden yang sangat sesuai sebanyak 3 orang pegawai, jawaban yang sesuai sebanyak 53 orang pegawai, jawaban kurang sesuai sebanyak 29 orang pegawai, dan jawaban yang tidak sesuai sebanyak 1 orang pegawai. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.15 berikut :

Diagram 4.15
Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Gubernur No.35 Tahun 2008
Tentang Rencana Induk dan Standarisasi *Digital Government Service* (DGS)



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dari jawaban mayoritas responden yaitu sesuai sebanyak 53 orang pegawai. Dapat kita lihat bahwa dari implemetasi *e-Government* di Provinsi Banten sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.35 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk dan Standarisasi Penyelenggaraan *Digital Government Service* (DGS), walaupun sampai saat ini tujuan tersebut kurang maksimal dilaksanakan.

4.2.6 *Citizen Interfaces*(interaksi pengguna)

Citizen Interfaces, menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (*multi access channels*) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan *stakeholders e-Government* dimana saja dan kapan saja mereka inginkan. Dalam penerapan *e-Government* ini, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui sistem *online* atau berbentuk *website*.

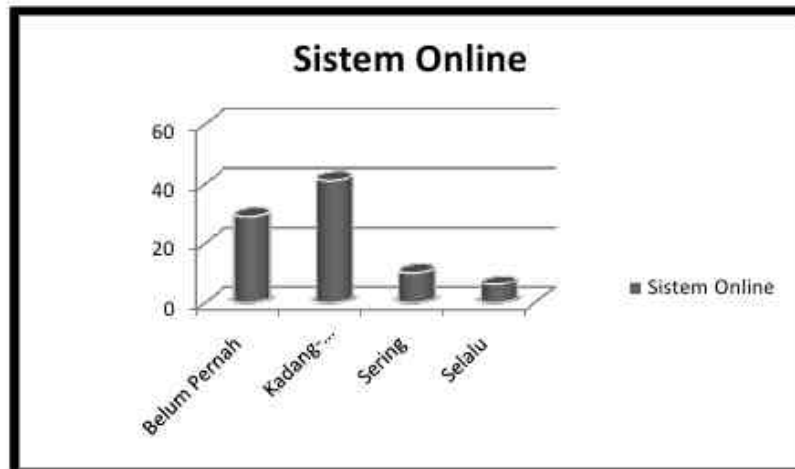
Tabel 4.16
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sistem *Online*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid belum pernah	29	33,7	33,7	33,7
kadang-kadang	41	47,7	47,7	81,4
sering	10	11,6	11,6	93,0
selalu	6	7,0	7,0	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, mengenai pelayanan kepada masyarakat sudah memanfaatkan sistem *online*. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, sebagai berikut: jawaban responden belum pernah sebanyak 29 orang pegawai atau 33,7%, jawaban responden kadang-kadang sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%, jawaban responden sering sebanyak 10 orang pegawai atau 11,6%, dan jawaban responden selalu sebanyak 6 orang pegawai atau 7%. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.16 berikut :

Diagram 4.16
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan
Memanfaatkan Sistem *Online*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan jumlah responden sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi dalam pemberian layanan data dan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sistem *online* tetapi masih kurang maksimal. sehingga terkadang untuk memberikan layanan informasi dan data yang diperlukan masyarakat, masyarakat harus mendatangi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Sehingga, dapat dikatakan layanan informasi dan data dengan menggunakan sistem *online* kurang maksimal.

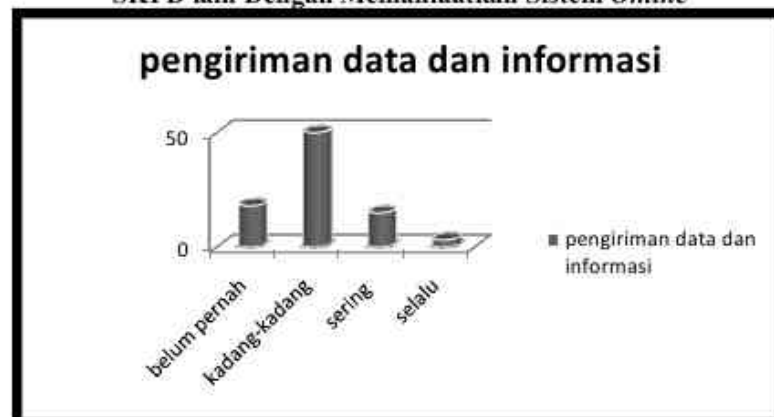
Tabel 4.17
Tanggapan Responden Mengenai Pengiriman data dan informasi kepada SKPD lain Dengan Memanfaatkan Sistem *Online*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid belum pernah	18	20,9	20,9	20,9
kadang-kadang	50	58,1	58,1	79,1
sering	15	17,4	17,4	96,5
selalu	3	3,5	3,5	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, mengenai pengiriman data dan informasi kepada SKPD lainnya sudah memanfaatkan sistem *online*. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, sebagai berikut : jawaban responden belum pernah sebanyak 18 orang pegawai atau 20,9%, jawaban responden kadang-kadang sebanyak 50 orang pegawai atau 58,1%, jawaban responden sering sebanyak 15 orang pegawai atau 17,4%, dan jawaban responden selalu sebanyak 3 orang pegawai atau 3,5%. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.17 berikut :

Diagram 4.17
Tanggapan Responden Mengenai Pengiriman data dan informasi kepada SKPD lain Dengan Memanfaatkan Sistem *Online*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang pegawai atau 58,1%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi dalam pengiriman data dan informasi kepada masyarakat ataupun SKPD sudah dilakukan dengan sistem *online* tetapi kurang maksimal, sehingga terkadang untuk melakukan pengiriman data dan informasi, harus mendatangi SKPD yang bersangkutan. Sehingga, dapat dikatakan pengiriman data dan informasi dengan menggunakan sistem *online* kurang maksimal.

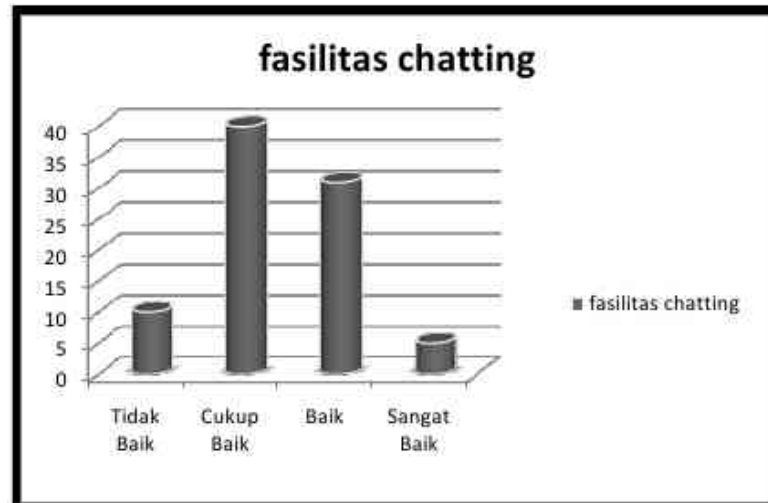
Tabel 4.18
Tanggapan Responden Mengenai fasilitas *chatting* dalam *website*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak baik	10	11,6	11,6	11,6
	kurang baik	40	46,5	46,5	58,1
	baik	31	36,0	36,0	94,2
	sangat baik	5	5,8	5,8	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, mengenai fasilitas *chatting* dalam *website*. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, sebagai berikut : jawaban responden tidak baik sebanyak 10 orang pegawai atau 11,6%, jawaban responden kurang baik sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5%, jawaban responden baik sebanyak 31 orang pegawai atau 36%, jawaban responden sangat baik sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%. Dan untuk lebih jelasnya pada diagram 4.18 berikut :

Diagram 4.18
Tanggapan Responden Mengenai fasilitas *chatting* dalam *website*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui, mayoritas responden menjawab kurang baik dengan jumlah responden sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi dalam menggunakan fasilitas *chatting* dalam *website* sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun keluhan terhadap Dinas Pertambangan dan Energi tidak maksimal.

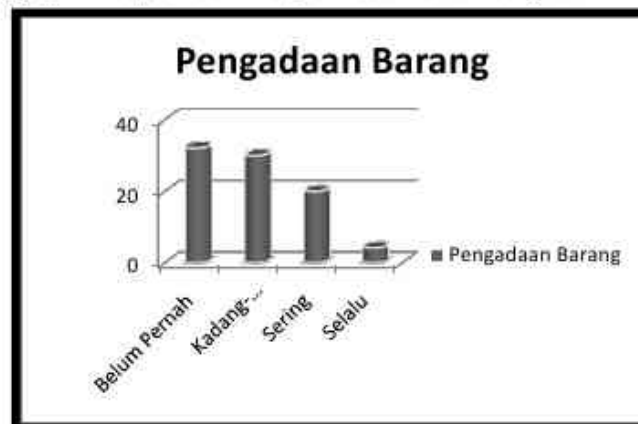
Tabel 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Pengadaan Barang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid: belum pernah	32	37,2	37,2	37,2
kadang-kadang	30	34,9	34,9	72,1
sering	20	23,3	23,3	95,3
selalu	4	4,7	4,7	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, mengenai sosialisasi tentang pengadaan barang pada *website* Provinsi Banten. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden yang merupakan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, sebagai berikut : jawaban responden belum pernah sebanyak 32 orang pegawai atau 37,2%, jawaban responden kadang-kadang sebanyak 30 orang pegawai atau 34,9%, jawaban responden sering sebanyak 20 orang pegawai atau 23,3%, dan responden yang menjawab dengan jawaban selalu sebanyak 4 orang pegawai atau 4,7%. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.19 berikut :

Diagram 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Pengadaan Barang



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui jawaban mayoritas responden mengenai sosialisasi pengadaan barang pada Dinas Pertambangan dan Energi belum pernah sebanyak 32 orang pegawai atau 37,2%, jawaban tersebut berbanding sedikit dengan jawaban responden kadang-kadang sebanyak 30 orang pegawai atau 34,9%. Jadi, sosialisasi informasi tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kurang maksimal.

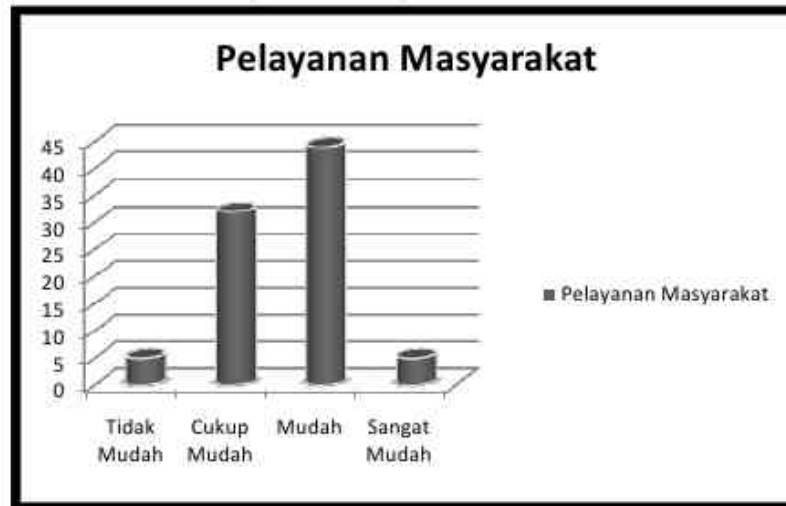
Tabel 4.20
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat Menjadi Lebih Mudah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak mudah	5	5,8	5,8	5,8
cukup mudah	32	37,2	37,2	43,0
mudah	44	51,2	51,2	94,2
sangat mudah	5	5,8	5,8	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel di atas, mengenai dengan adanya penerapan *e-Government*, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, sebagai berikut : jawaban responden tidak mudah sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%, jawaban responden cukup mudah 32 orang pegawai atau 37,2%, jawaban responden mudah sebanyak 44 orang pegawai atau 51,2%, dan jawaban responden sangat mudah sebanyak 5 orang pegawai atau 5,8%. Untuk lebih jelasnya pada diagram berikut :

Diagram 4.20
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat Menjadi Lebih Mudah



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui jawaban mayoritas responden menjawab mudah sebanyak 44 orang pegawai atau 51,2%. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya penerapan *e-Government* pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cukup mudah, adapun faktor penghambatnya yaitu SDM aparatur Pemerintah kita yang masih belum maksimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, keterbatasan pengetahuan dan *skill* yang merupakan faktor keberhasilan penerapan *e-Government*.

4.4.7 *Capital*

Menyangkut pola permodalan proyek *e-Government* yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan pengembangan. *E-Government* memiliki lingkup kegiatan yang luas sehingga membutuhkan

pembiayaan yang besar.

Tabel 4.21

Tanggapan responden mengenai anggaran pemeliharaan *e-Government*

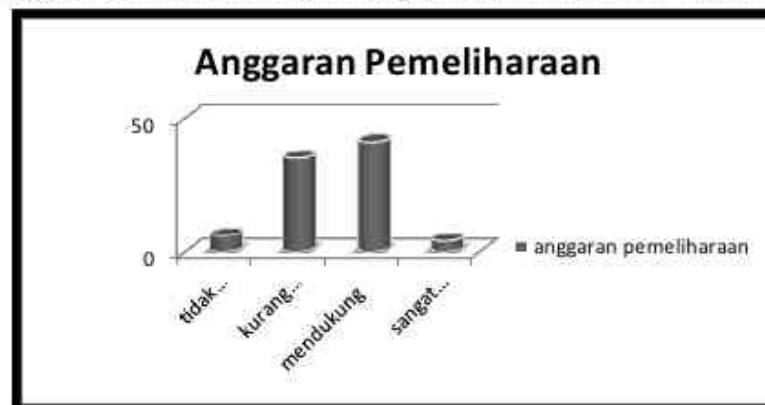
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mendukung	6	7,0	7,0	7,0
	kurang mendukung	35	40,7	40,7	47,7
	mendukung	41	47,7	47,7	95,3
	sangat mendukung	4	4,7	4,7	100,0
	Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, mengenai anggaran pemeliharaan dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, antara lain : jawaban responden tidak mendukung sebanyak 6 orang pegawai atau 7%, jawaban responden kurang mendukung sebanyak 35 orang pegawai atau 40,7%, jawaban responden mendukung sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%, sedangkan Jawaban responden sangat mendukung sebanyak 4 orang pegawai atau 4,7%. Untuk lebih jelasnya pada diagram 4.21 berikut:

Diagram 4.21

Tanggapan responden mengenai anggaran pemeliharaan *e-Government*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui, jawaban mayoritas responden mengenai pemeliharaan dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mendukung sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan dalam hal pemeliharaan di Dinas Pertambangan Dan Energi sudah mendukung implementasi *e-Government*.

Tabel 4.22
Tanggapan responden mengenai anggaran pengembangan *e-Government*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak mendukung	3	3,5	3,5	3,5
kurang mendukung	38	44,2	44,2	47,7
mendukung	37	43,0	43,0	90,7
sangat mendukung	8	9,3	9,3	100,0
Total	86	100,0	100,0	

(Sumber : Data diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, mengenai anggaran pengembangan dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Didapatkan jawaban dari 86 orang responden, antara lain : jawaban responden tidak mendukung sebanyak 3 orang pegawai atau 3,5%, jawaban responden kurang mendukung sebanyak 38 orang pegawai atau 44,2%, jawaban responden mendukung sebanyak 37 orang pegawai atau 43%, sedangkan jawaban responden sangat mendukung sebanyak 8 orang pegawai atau 9,3%. Untuk lebih jelasnya pada diagram berikut :

Diagram 4.22
Tanggapan responden mengenai anggaran pengembangan *e-Government*



(Sumber : Data diolah, 2010)

Dapat diketahui, jawaban mayoritas responden mengenai anggaran pengembangan dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kurang mendukung sebanyak 38 orang pegawai atau 44,2%. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pengembangan *e-Government* Dinas Pertambangan Dan Energi terkendala dalam hal pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi bapak Ir. H. Cepi Suwardi Mulya Noor, MM. M.Si., bahwa diperlukan anggaran yang besar agar penerapan *E-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik, Sementara ketersediaan anggaran dinas sangat terbatas, dan masih banyak permasalahan – permasalahan yang *urgent* yang harus di selesaikan. Sehingga implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan Dan Energi belum maksimal.

4.2 Hasil Uji Validitas Instrument

Uji Validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran (Sugiyono, 2007:212). Rumus uji validitas instrument adalah :

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi *Product Moment*
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- $\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = Jumlah sampel

Tabel 4.23
Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrument

No. Instrument	r_{hitung}	r_{tabel}	KEPUTUSAN
1	0,520	0,270	VALID
2	0,441	0,270	VALID
3	0,508	0,270	VALID
4	0,314	0,270	VALID
5	0,547	0,270	VALID
6	0,569	0,270	VALID
7	0,599	0,270	VALID
8	0,538	0,270	VALID
9	0,477	0,270	VALID
10	0,513	0,270	VALID
11	0,722	0,270	VALID
12	0,686	0,270	VALID
13	0,651	0,270	VALID
14	0,536	0,270	VALID
15	0,561	0,270	VALID
16	0,403	0,270	VALID
17	0,714	0,270	VALID
18	0,569	0,270	VALID
19	0,374	0,270	VALID
20	0,558	0,270	VALID
21	0,467	0,270	VALID

4.3 Uji Reliabilitas Instrument

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai *alphanya* lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_i^2} \right)$$

Diketahui :

$$\sum S_i^2 = 10,43$$

$$\sum S_i^2 = 62,08$$

$$n = 21$$

$$r_{11} = \dots?$$

Jawab :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_i^2} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{21}{21-1} \right) \left(1 - \frac{10,43}{62,08} \right)$$

$$r_{11} = (1,05) (0,8319)$$

$$r_{11} = 0,874$$

Jadi, reliabilitas instrument *e-Government* = 0,874. Dari hasil r_{hitung} 0,874 ternyata lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,30. jadi kesimpulannya instrument dinyatakan reliabel karena berdasarkan uji instrument ini sudah valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrument dapat digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data implementasi *e-Government*.

4.5 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

“Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kurang maksimal. Peneliti memprediksi hipotesis tersebut paling tinggi 75% dari nilai ideal yaitu 100%”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus *t-test satu sample*. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal untuk Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah $4 \times 86 \times 21 = 7224$ (4 = nilai dari jawaban ideal; 86 = jumlah responden; 21 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk skor penelitian (lihat dilampiran tabel distribusi data) adalah sebesar 4435. Dengan demikian nilai “Implementasi *E-government* Di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.” adalah $4435 : 7224 = 0,61393$ maka dalam persentase menjadi 61,4%.

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus *t-test satu sampel*. Skor ideal untuk Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, adalah $4 \times 86 \times 21 = 7224$. Dan nilai *mean* atau nilai rata-ratanya adalah $7224 : 86 = 84$. Dari uji hipotesis tersebut, maka Implementasi *E-government* di Pertambangan dan

Energi Provinsi Banten, memprediksikan hipotesis paling tinggi adalah 75% dari nilai ideal yaitu 100%. Maka nilai yang dihipotesiskan adalah $0,75 \times 84 = 63$, sedangkan untuk menghitung statistiknya adalah sebagai berikut :

H_0 untuk memprediksikan μ_0 lebih rendah atau sama dengan 75% dari skor ideal.

H_a untuk memprediksikan μ_0 lebih besar dari 75% dari skor ideal.

$$H_0 : \mu_0 \leq 75\% \leq 0,75 \times 84 = 63$$

$$H_a : \mu_0 > 75\% > 0,75 \times 84 = 63$$

Pengujian hipotesis menggunakan rumus *t-test satu sample* dengan uji pihak kanan, adalah sebagai berikut :

Diketahui :

$$\bar{x} = \left(\frac{4435}{86} \right) = 51,56$$

$$\mu_0 = 63$$

$$s = 7,93$$

$$n = 86$$

Ditanya : t ?

$$\text{Jawab : } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \left(\frac{51,56 - 63}{\frac{7,93}{\sqrt{86}}} \right)$$

$$t = \left(\frac{-11,44}{0,855} \right)$$

$$t = -13,38$$

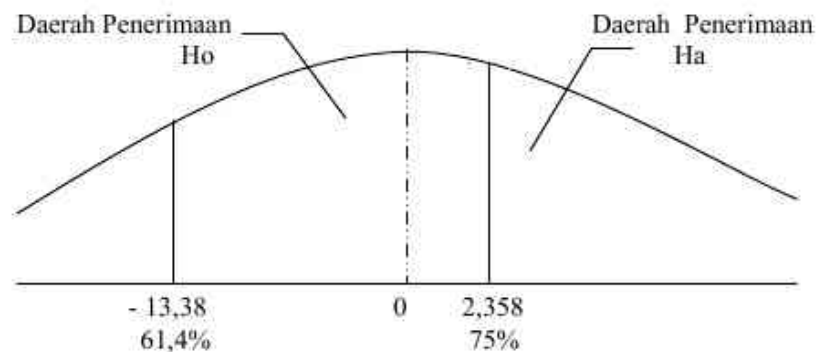
Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} dengan derajat kebebasan $(dk) = n - 1 = 86 - 1 = 85$ dan taraf kesalahan $\alpha = 1\%$ untuk uji satu pihak kanan, maka harga t_{tabel} nya yaitu 2,358. Karena harga t_{hitung} lebih kecil dari pada harga t_{tabel} ($-13,38 < 2,358$) dan jatuh pada daerah penerimaan H_0 , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_1) ditolak. Harga ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1 Harga -13,38 terletak pada daerah penerimaan H_0 .

Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa Implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis Implementasi} = \frac{4435}{7224} \times 100\% = 61,4\%$$

Jadi, telah diketahui bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah sebesar 61,4%.

Gambar 4.2
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

Intrepretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau suatu pandangan teoritis terhadap sesuatu (**Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, 2005:439). Dalam penelitian ini, hal yang paling utama dan diutamakan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diawal penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kita dapat melihatnya dari hasil perhitungan dengan menggunakan seperti dalam perhitungan *t-test satu sampel*, berdasarkan penghitungan pada pengujian hipotesis *t-test* satu variabel didapatkan bahwa ternyata t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} , dan hal itu dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_a

ditolak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban dari rumusan masalah deskriptif yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengenai beapa besar penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, sebagai berikut : bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kurang maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan dalam penelitian analisis implementasi *e-Government* tersebut mencapai 61,4%. Hipotesis yang menyatakan bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten masih kurang maksimal atau masih dikatakan rendah (dengan prediksi paling tinggi 75%) dari yang diharapkan dapat diterima, atau tidak terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul.

4.7 Pembahasan

Dari pembahasan yang memaparkan tentang pengujian hipotesis, menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari data tersebut menjelaskan bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya peneliti mencoba menjawab rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yaitu berapa besar implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, yaitu :

Jawaban dari rumusan masalah, yaitu tentang berapa besar implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, sebagai berikut : bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Provinsi Banten belum berjalan maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan dalam implementasi *e-Government* tersebut. Skor ideal untuk Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah $4 \times 86 \times 21 = 7224$ ($4 =$ nilai dari jawaban ideal; $86 =$ jumlah responden; $21 =$ jumlah pertanyaan dalam kuesioner), sedangkan hasil kuesioner pengumpulan data adalah 4435. Dengan demikian analisis implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah $4435 : 7224 = 0,614 \times 100\% = 61,4\%$ dari yang diharapkan. Pengujian hipotesis pada bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan data yang terkumpul dapat diketahui bahwa analisis implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mencapai angka 61,4% dari yang diharapkan yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten belum maksimal.

Data yang memperkuat bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten belum maksimal diantaranya adalah mengenai aplikasi *software* Dinas Pertambangan dan Energi dapat terintegrasi dengan sistem yang dipakai oleh Provinsi Banten jawaban mayoritas responden yang menjawab kurang baik sebanyak 41

orang pegawai atau 47,7%. Dari jawaban tersebut kita dapat mengetahui bahwa aplikasi *software* yang digunakan dapat dikatakan kurang terintegrasi dengan baik, hal tersebut merupakan penghambat dari implementasi *e-Government*.

Pelatihan yang diterima oleh para pegawai hanya dilakukan beberapa kali, terlihat dari jawaban responden sebanyak 53 orang dari 86 orang pegawai atau 61,6%. Dapat dikatakan bahwa pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai tidak maksimal sehingga menghambat penerapan *e-Government* pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Selain itu, situs informasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dapat dikatakan kurang baik, terlihat dari hasil jawaban mayoritas responden yang menjawab kurang baik sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa karena masih banyak *link* pada *website* Dinas Pertambangan dan Energi yang tidak *uptodate* bahkan ada *link* yang masih kosong tidak ada informasi di dalamnya.

Dinas Pertambangan dan Energi dalam pemberian layanan data dan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sistem *online* tetapi kurang maksimal. Mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan jumlah responden sebanyak 41 orang pegawai atau 47,7%. Sehingga terkadang untuk memberikan layanan informasi dan data yang diperlukan masyarakat, masyarakat harus mendatangi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Sejalan dengan itu, Dinas Pertambangan dan Energi juga dalam hal pengiriman data dan informasi kurang maksimal karena dari 86

responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang pegawai atau 58,1%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi dalam pengiriman data dan informasi kepada masyarakat atau pun SKPD sudah dilakukan dengan sistem *online* tetapi kurang maksimal.

Hal lain yang menunjukkan bahwa kurang maksimalnya implementasi *e-Government* pada Dinas Pertambangan dan Energi yaitu dalam menggunakan fasilitas *chatting* dalam *website* sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun keluhan terhadap Dinas Pertambangan dan Energi diketahui, mayoritas responden menjawab kurang baik dengan jumlah responden sebanyak 40 orang pegawai atau 46,5%. Selain itu mengenai sosialisasi pengadaan barang pada Dinas Pertambangan dan Energi mayoritas responden menjawab belum pernah sebanyak 32 orang pegawai atau 37,2%, jawaban tersebut berbanding sedikit dengan jawaban responden kadang-kadang sebanyak 30 orang pegawai atau 34,9%. Jadi, sosialisasi informasi tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi belum maksimal.

Dalam hal anggaran pengembangan dalam penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mayoritas responden menjawab kurang mendukung sebanyak 38 orang pegawai atau 44,2%. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pengembangan *e-Government* Dinas Pertambangan Dan Energi terkendala dalam hal pembiayaan.

Seperti yang dikatakan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi bapak Ir. H. Cipi Suwardi Mulya Noor, MM. M.Si., bahwa diperlukan anggaran yang besar agar penerapan *E-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik, Sementara ketersediaan anggaran dinas sangat terbatas, dan masih banyak permasalahan – permasalahan yang *urgent* yang harus di selesaikan. Sehingga implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan Dan Energi belum maksimal.

Jadi, implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sampai saat ini belum berjalan maksimal. Akan tetapi, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila juga didorong oleh anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Suatu program yang telah *diplanning* dan implementasikan membutuhkan anggaran yang cukup, didukung oleh perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan dan juga evaluasi anggaran yang baik. sehingga program yang dilaksanakan tercapai dengan baik, sesuai dengan tujuan *e-Government* yang berkelanjutan dan juga didukung pula oleh faktor-faktor pendukung lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul penelitian “ Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh **Indrajit** (2005:18), bahwa dalam penerapan *e-Government* mengandung enam indikator yaitu : *Content Development* (pengembangan isi), *Competency Building* (pembangunan kompetensi), *Connectivity* (konektifitas/hubungan), *Cyber Laws* (peraturan dan undang-undang *cyber*), *Citizen Interfaces* (interaksi pengguna), *Capital* (modal).

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada BAB I, maka jawaban rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten hanya mencapai 61,4% (dengan prediksi paling tinggi 75%), sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten berjalan kurang maksimal, dikarenakan masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Banten diantaranya kurangnya pelatihan terhadap pegawai, kurangnya *updating* data dan informasi yang terdapat pada *website* DISTAMBEN, penggunaan fasilitas *chatting* dalam *website* tidak maksimal, dan kurangnya anggaran dalam pengembangan *e-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul " Implementasi *E-government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten". Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan *Competency Building* (pembangunan kompetensi) para pegawainya melalui peningkatan frekuensi pelatihan seperti pelatihan tentang sistem pada *website* dan cara *update* data dalam *website*.
2. Melakukan pengawasan yang intensif dalam *Connectivity* (konektifitas/hubungan), sehingga fasilitas yang ada seperti fasilitas *chating* yang terdapat pada *website* dapat berguna Sebagai sarana komunikasi. Di samping itu *updating* data dan informasi yang terdapat pada *website*, terhadap perkembangan informasi yang terjadi di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;
3. Meningkatkan sosialisasi *website* melalui media masa guna meningkatkan interaksi pengguna (*Citizen Interfaces*), baik kepada masyarakat maupun pihak swasta, agar dapat meningkatkan partisipasi mereka terhadap Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

4. Menyusun kembali prioritas anggaran guna menunjang pelaksanaan penerapan *e-Government* di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi Dan Akuntabilitas melalui E-government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Budiati, Ayuning. 2003. *Improving E-government Implementation to Enhance Public Service Delivery in Indonesia*. Tesis Magister tidak diterbitkan. Australia: Monash University.
- Djunaedi, Achmad. 2002. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Alam Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. otda.lampungprov.go.id/downlot.php?file=files/e-govt-pemda-indo.pdf
- Hermawan Kartajaya, M. Hermawan, Yuswohady, Taufik, Sonni, H. Anwar, H.H. Joewono, J. Mussry. 2002. *MarkPlus on Strategy*. PT Gramedia, Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko dkk. 2005. *E-government In action: Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- _____. 2006. *Electronic Government : Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Republik Indonesia.
- Intruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2001 Tentang Telematika(*Telekomunikasi, Media Dan Informatika*)
- Juni. 2007. *Implementasi E-government Di Indonesia*. URL: <http://www.pureportals.com/Default.aspx?tabid=210050&newsType=ArticleView&articleId=848>.
- Kementerian Komunikasi Dan Informasi. 2002. *Kebijakan Dan Strategi Pengembangan E- Government*.
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi. Nomor : /KEP/M.KOMINFO/VIII/2004 : *Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan Dan Pengembangan Aplikasi E-government*.

- Kumoro, 2007. *Implementasi Kebijakan*. URL: <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/06/implementasi-kebijakan.pdf>.
- Mc Leod, Raymond dan George Schell. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: INDEKS.
- Nugroho, Triaji. 2007. *Harapan Terhadap Implementasi E-government*. URL:<http://triajinugroho.wordpress.com/2007/06/13/lagi-harapan-terhadap-implementasi-e-government/>.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (Rip-Sitel) Pemerintah Provinsi Banten.
- Purwanto. 2007. *Instrument Penelitian Sosial dan Pendidikan : Pengembangan & Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifaiza. 2007. *Definisi dan Manfaat Utama E-government*. <http://rifaiza.wordpress.com/2007/08/15/definisi-dan-manfaat-utama-e-government/>.
- Setiawati, Wenny. 2007. *Penerapan E-government Di Indonesia*. URL: http://komunikasipublik.multiply.com/journal/item/120/Penerapan_E-government_di_Indonesia.
- Sosiawan, Edwi Arief. 2007. *Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia*. URL: <http://edwin.dosen.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf>.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Muhammad Joko, 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : PT, Bumi Aksara
- Wibisono, Y & Sulistyarningsih, W. 2002. *The Development of E-government in Indonesia*. URL: http://www.uncrd.or.jp/ict/eworkspace/papers/dp_woro.htm.

Wicaksana, I Wayan. 2007. *Konsep e-Government*.
<http://iwayan.staff.gunadarma.ac.id>.